Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009)

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama: Widia Risminingsih

No. Mahasiswa: 08312045

Jurusan: Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009)

SKRIPSI

disusundandiajukanuntukmemenuhisebagaisalahsatusyaratuntuk

mencapaiderajatSarjana Strata-1 jurusanAkuntansi

padaFakultasEkonomi UII

Oleh :

Nama:WidiaRisminingsih

NomorMahasiswa :08312045

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 23 April 2012

Penulis,



Widia Risminingsih

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi

dengan judul:

" Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009)"

diajukan oleh:

Nama Widia Rismi Ningsih

No mahasiswa : 08312045

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 11 April 2012

Dosen pembimbing,

Mahmudi,,S.E.,M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

"Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009)

Disusun Oleh: WIDIA RISMININGSIH
Nomor Mahasiswa: 08312045

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 14 Mei 2012

Penguji/Pemb. Skripsi	:	Mahmudi, SE, M.Si, Ak
Penguji	:	Dra. Noor Endah Cahyawati, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

Niscaya ALLAH akan meninggikan beberapa derajad orang-orang yang beriman diantara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad (Quran Al Mujadallah 11)

Sesungguhnyasesudahkesulitanituselaluadakemudahan makaapabilakamutelahselesai (darisatuurusan), makakerjakanlahdengansungguh-sungguhurusan yang lain. Dan hanyakepadaTuhan Mu lahhendaknyakamuberharap.(QS. Al Insyirah:6-8)

"Kenalilah Allah saat kamu senang, niscaya Dia akan mengenalimu saat kamu sedang susah."

(HR. Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan Baihaqi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Akan kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada

Kedua orangtuaku, kakek nenekku dan kedua adekku yang selalu mendukung, memberi nasihat dan menyayangi aku dengan segenap jiwa raga mereka, maka dengan setulus hati kupersembahkan karyaku untuk menjadi salah satu bentuk bukti rasa cintaku terhadap keluarga.

…

Sahabat-sahabat q yang slalu mendukungku dalam susah dan senang, selalu tertawa bersama bahkan saat aku menangis waktu ujian kompre kalian selalu memotivasiku. Kalianlah alasanku selalu belajar, belajar dan belajar agar aku bisa lulus dengan cepat dan kita bisa berbagi kegembiraan bersama- sama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Pujisyukur Alhamdulillah, penulispanjatkankehadirat Allah SWT, ataslimpahanrahmatdanhidayah-Nya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinidenganbaikdanlancar.Skripsiinimerupakansalahsatusyaratakademikdalammenyelesaikan program sarjana S-1 di FakultasEkonomiUniversitas IslamIndonesia, Yogyakarta.

Skripsidenganjudul"***Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009",***

Dalammelaksanakanpenelitianuntukpenulisankaryainipenulisbanyakmemperolehbantuanbaik yang berupamaterimaupun non materiberbagaipihak, sehinggapenulisdapatmenyelesaikankaryainidenganbaik.Untukitutidakada yang dapatpenulissampaikanselainterimakasih yang sebesar-besarnyakepada yang terhormat :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia yang tiada henti. Terimakasih atas ridho dan izin-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Mahmudi,,S.E.,M.Siselakudosenpembimbing. Terimakasihbapakatassemuawaktu, tenaga, arahandankesabarannyasehinggaskripsiiniterlaksana.
3. Dosenpenguji, yang telahberkenanuntukmengujiskripsipenulis.

4. SegenapDosenFakultasEkonomi, Universitas Islam Indonesia yang sekiranyatelahmemberikanbanyakpengetahuandanilmunyapadapenulisselamamenimbailmu di FakultasEkonomiUniversitas Islam Indonesia.

5. SeluruhKaryawanFakultasEkonomi, Universitas Islam Indonesia

6. Ayah dan ibu terima kasih atas segala kasih sayang dan cinta yang selalu diberikan kepadaku dan selalu mendukungku, membimbingku dalam setiap jalan hidupku, tak ada kata yang bisa kuucapkan untuk melukiskan rasa terima kasihku dan sayangku kepada ayah dan ibuk

7. Kakek Ponijo dan Mbah Sumini, Mbah Tuyar dan Mbah Rajinem, Mbah Jemjem Mbah Muji dan Mbah Alimin (Almarhumah) terima kasih atas dukungan kalian.

8. luluk dan Giri kedua dongsaengku, kalian adalah adex-q terbuaex dan sangat berarti dalam perjalan hidupku. Giri adek yang slalu lucu dan bisa membuat q tertawa baik dalam susah dan senang. Luluk km adalah adex terbuaexxx tiap hari berbagi cerita tentang oppadeull, baca fanfic bersama pokoknya km in the best dech. huwaaaa jgnn ampex suka ma kyuppaa awazz ajahh wonnie q ajak ke KUA wkwkwk.Terima Kasih banyak atas dukungan dan cinta kasih kalian selama ini.

9. Terima Kasih kepada Keluarga pakdhe Mulkimpi Riyatno, Budhe Tari, Mbak Ita, Mas Feri, dan Argian, Danu Terima Kasih atas Doa dan dukungannya selama ini.

10. Terima Kasih kepada Om Aguz, Bulek Titi, Pakdhe Sugenx dan Dhe pon, Mbak Ipah,Keluarga Besar Almarhumah Bapak Sunaryo, Keluarga Bapak Tugimin, Keluarga Bapak Sutarno, Pakdhe Slamet Beserta Keluarga, Pak Pomo, Mbak Tugini, Bu Ari, Mak Gathot Dan Mbah Sumiati (Almarhumah). Terima Kasih atas doa dan perhatian selama ini.

11. Terima Kasih Kepada sahabat- sahabat q “Misscherezzzz” S2, Maya, Vita, Novi, Veny, Riza, Nissa, Billa, Ichi dan Ika serta Linda Gag pernahberhenti-hentinyaakuselalumengucapkansyukurdanterimakasih yang sebesar-besarnyaya Allah, karenaEngkausudahmempertemukankudenganmereka. 4tahunbukanlahwaktu yang sebentaruntukmenjalinsebuahpersahabatan. Mungkinakubukansahabat yang baikbuatmereka, tapisesungguhnyaYa Allah, merekabenar-benarsahabat yang terbaik yang pernahsayatemui. Sahabatyang gagcumanbisadiajakmenggila, tapijugatemansekaligus guru belajar. Dari pelajarankuliah, ujian, tugas, dankompre..merekalah guru yang berharga.
12. Terima Kasih Untuk Inna unni, Ayak unni, Nurul, Icha, berkattt kaliann q menjadi makin tergila-gila dengan oppadeull hehe wkwk Inna Onni jga baik-baik unyukk oppa lok q bosen ma kyupaa bisa q ambil ntarr hehee, huwaaa ayak unni yang sabar yauw mau ditinggal teuki oppaa cari suami baru ajahh tak dukung 100%, Nurullll huwaaa kita harusss ikhlas kalau kyupaaa byk yang naksir huwaaa g kuat punya suamiii tampan kayak kyuppaaa wkwkwk,, ichaaa jgain wonnie jgn ampex diambill yang lainn,,he he.
13. Terima Kasih untuk Mas Fajar yang selama ini selalu kasih dukungan, doa, nasehat yang sangat berguna untuk widy, Makasih banyakk mazz
14. Terima Kasihh Untuk Reyha, Nanang, Papahh Dhamanx, Icha, Panji, Ndari, Dandi, Adit dan Agung, Dimaz, Ika(Almarhumah), Arum, Dex Dewi and Dex Ria Terima Kasih atas dukungannya.
15. Terima Kasih Untuk teman- teman KKN unit 15 , Mas Resma, Pak Ketua, Mas Bento,Arif, A’A Febri, Suci, Jenx Ani, Lia , Via, Serta Bapak Ma ibuk,

Dekrumi,mbakRantiTerimaKasih mengajarkan akan arti pentingnya kebersamaan dan kekeluargaan.

16. Terima Kasih Untuk Mobilindo cell yang selalu memberi masukan yang sangat berharga bagi widy.
17. Terima Kasihhh Untuk Oppadeulll Super Juniorrr hehe,,,Huwaaaa Kyupa jongmal sarangheyoo,,, kalau g da oppadeulll pastiii bosenn cozz g da hiburannn yang TOP selainnn Oppadeulll.Gomawoo oppa slalu bisa bikin widy happy dengan tingkah laku konyol kalian di reality showw maupun di Super Showw..he he,,,To Kyuniee Oppa Awazz jangan selingkuhhh oppa g ingat dah punya cho widyy di rumah hehe
18. TerimaKasihUntuksemuapihak yang tidakbisadisebutkansatupersatuterimakasihatasdukunganya dan doanya.

Semoga Allah melimpahkanrahmatdanhidayahnyabagikitasemua, terimakasihatasdoadansemuadukungan yang ada. Penulismenyadaribahwatulisaninimasihjauhdarisempurna, kritikdan saran yang membangunsangatpenulisharapkan.Akhirnyapenulisberharapsemogaskripsiinidapatmemberikanbanyakmanfaatbagipembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta,23April 2012

Penulis,

Widia Risminingsih

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan Skripsi iv

Berita Acara Ujian Skripsi..... v

Motto vi

Halaman Persembahan vii

Kata Pengantar..... viii

Daftar Isi xii

Daftar Tabel..... xv

Daftar Gambar xv

Daftar Lampira xv

Abstraksi..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Batasan Masalah 7

1.5 Manfaat Penelitian 7

1.6 Sistematika Pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah …….....……. 10

2.2 Kinerja Keuangan 11

2.3 Anggaran Pendapatan dan belanja daerah..... 13

2.4 Pertumbuhan Ekonomi..... 18

2.5 Pengganguran …….. 19

2.6 Indeks Pembangunan Manusia ...……. 22

2.7 Kemiskinan ……. 23

2.8 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan daerah

Dengan Pertumbuhan Ekonomi 24

2.9 Penelitian Terdahulu …… 24

2.10 Model Penelitian ……..… 26

2.11 Pengembangan Hipotesis ……... 27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel ……. .. 32

3.2 Jenis Data …….. 32

3.3 Teknik Pengumpulan Data …… 32

3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

3.4.1. Rasio Kemandirian……. 33

3.4.2. Rasio Efektifitas ……. .. 33

3.4.3. Rasio Pertumbuhan APBD …… 34

3.4.4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ……. 35

3.4.5. Surplus/Defisit ……. 35

3.4.6. Variabel Eksogen…….. 36

3.4.7. Variabel Endogen …….. 36

3.5 Teknik Pengujian data dan Pengujian Hipotesis …….. 36

3.6 Metode Analisis Data…….. 37

3.6.1 Stastistik Deskriptif…….. 37

3.6.2 Evaluasi Kriteria Goodness of fit……. 38

3.6.3 Model Persamaan……. 40

3.6.4 Hipotesis Pengujian……..... 41

3.6.5 Keputusan Pengujian Hipotesis …….. 43

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif ……..... … 44

4.2 Analisis Statistik …… ... 48

4.3 Uji Kebaikan Model…… 49

4.4 Pengujian Struktur Model ……. 52

4.5 Pengaruh Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekono……. . 53

4.6 Pengaruh Efektifitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ……. 55

4.7 Pengaruh Pertumbuhan APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.. 56

4.8 PengaruihKetregantunganTerhadapPertumbuhanEkonomi ……. 57

4.9 Pengaruh Surplus/Defisit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi…… 59

4.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengganguran…… 60

4.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan…….. 61

4.11 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM ……... 62

BAB V Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan 66

5.2 Keterbatasan Penelitian 67

5.3 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Stastistik Deskriptif …….……. 48

Tabel 4.2 Goodness Of Fit Indeks…….. 49

Tabel 4.3 Estimasi Hasil Analisis SEM…….. 53

Tabel 4.4 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung……. 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasli Diagram Jalur Out AMOZ…… 52

\

ABSTRAK

PenelitianiniberjuduL“AnalisisAnteseden dan Konsekuens Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009 Anteseden dalam penulisan ini adalah Kinerja Keuangan yang diukur berdasarkan rasio Kemandirian, rasio efektifitas, rasio ketergantungan keuangan daerah, surplus defisit, rasio pertumbuhan APBD. Sedangkan Konsekuen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengganguran dan Indeks pembangunan manusia. Tujuan dari peneltian ini untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dalam hal ini diproksikan dengan mengunakan
Rasio Kemandirian, rasio efektifitas, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio surplus defisit, rasio pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta untuk menguji pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap pengganguran, indeks Pembangunan manusia dan kemiskinan.

Penelitian ini mengambil sambel dari 29 pemerintah kabupaten pada periode 2006-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD beserta realisasinya, data pertumbuhan ekonomi, pengganguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Pengujian dilakukanan mengunakan program AMOS versi 6.0. dari delapan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada tiga diantaranya tidak terbukti.

Kata kunci:*Kinerja keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, pengganggguran, Indeks pembangunan manusia.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan Ekonomi saat ini sedang menjadi hal yangsangat di prioritaskan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri yaitu terjadinya perubahan/pertumbuhan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Menurut Todaro (2003) ada 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam tiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak angkatan kerja.
c. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi pusat tidak dapat lepas dari pembangunan ekonomi di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi daerah saat ini mengacu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia antar suatu wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi pusat.

Menurut Kuncoro (2004) dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi pembangunan" Edisi Ketiga Penerbit UPP Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi daerah itu sendiri merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjan baru yang dapat merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Didalam melakukan pembangunan daerah pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap suatu daerah, suatu pengelolan keuangan daerah yang baik akan menjadikan daerah tersebut menjadi suatu daerah yang kuat dan berkembang dengan pesat dan akan membawa dampak yang positif terhadap perkembangan daerah tersebut sebaliknya apabila dalam melakukan pengelolan keuangan daerah banyak terdapat penyelewengan keuangan daerah akan menjadikan daerah tersebut lemah.

Menurut Badan Pusat Stastistik dan Depsos Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dan jumlah Penduduk miskin Dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2005 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masing-masing daerah yaitu besarnya angka pengganggguran dan kemiskinan. Sehingga diperlukan Laju pertumbuhan yang lebih lagi untuk mendorong kinerja Ekonomi makro Daerah.

Jika dalam melakukan pengelolaan dilakukan secara tepat yaitu dilakukan secara transparan serta mengungkapkan kepada semua sesuai pihak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, efektif, efisien, relevan, dapat diperbandingkan dengan pengelolaan tahun-tahun lalu dan terhindar dari salah saji materiall hal ini dapat mendorong peningkatan ekonomi yang akan mengurangi tingkat penganguran hal ini dapat terlihat apabila suatu tingkat ekonomi dalam perkembangkan mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dapat memicu investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modal atau berinvestasi didalam suatu proyek yang ada di suatu daerah di indonesia hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang baru yang akan menyerap banyak karyawan yang akan mengurangi tingkat penganguran, dan kemiskinan.

Saat ini Kemiskinan membuat semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki seseorang. Hal Ini dapat terlihat melalui data Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dan jumlah Penduduk miskin Dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2005. Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih cukup besar, kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia seperti pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan, kesehatan. Sehingga apabila kemiskinan dapat dikendalikan maka akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Didalam Pengelolan daerah, keuangan daerah yang ditetapkan dalam sebuah bentuk anggaran pemerintah daerah merupakan hal yang sangat sentral yang digunakan untuk mencapai kinerja kuangan daerah yang baik yang dapat memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi, mengurangi jumlah kemiskinan dan pengganguran dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terhadap suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan

pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil di masa yang akan datang. Kinerja keuangan daerah dapat di ukur dengan mengunakan rasio keuangan yang misalnya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan daerah, surplus/defisit.

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya dalam bidang keuangan Belanja daerah pada prinsipnya digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Belanja urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Dengan melakukan prioritas seperti yang terurai diatas maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yang akan mempengaruhi penganguran, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka indeks pembangunan manusia akan meningkat hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, dan pendapatan

penduduk. Jika kualitas pendidikan semakin meningkat dan kesehatan lebih baik maka sumber daya manusia akan mengalami peningkatan yang akan berdampak menurunnya jumlah kemiskinan.

Berdasarkan uraian–urain di atas maka peniliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dengan judul“ Analisis Anteseden dan Konsekuensi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Surplus Defisit, Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan APBD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengganguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan.

1.3 **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji Pengaruh Kinerja Keuangan dalam hal ini diproksikan dengan mengunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Surplus Defisit, Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Untuk menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengganguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti variabel Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai Data Keuangan APBD beserta Realisasinya, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengganguran, data Indeks Pembangunan Manusia serta Data Kemiskinan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pemerintah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengganguran, Indeks Pembangunan Manusia serta tingkat Kemiskinan. Dari hasilpenelitian ini nantinya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam upaya menyempurnakan Kinerja Keuangan Daerah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan tentunya menambah wawasan khususnya di bidang Analisis Keuangan Daerah

1.6 **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas secara rinci mengenai landasan teori dan kajian pustaka tentang Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, APBD, serta uraian tentang variabel-variabel yang digunakan, serta formulasi hipotesis yang didasarkan pada teori dan tinjauan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang populasi dan pemilihan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, perumusan model analisis serta pengujian hipotesis.

Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang telah dibuat dan dilakukan pengujian terhadapnya, serta pembahasan dan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

Bab V Penutup

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dar analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya, serta implikasi penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah

Mamesah (1995) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah" Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan faktor yang penting yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melakasanaan operasionalnya. Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dpat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara lain atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlkaku.Di dalam keuangan daerah terdapat 2 unsur penting yaitu :

Semua hak yang dimaksudkan yaitu meliputi hak untuk memungut pajak daerah, restribusi daerah sehingga menambah kekayaan daerah.

Kewajiban daerah dapat berupa kehubungan dengan kewajiban untuk membayar sehubungan dengan tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan oleh daerah setempat. Dengan Demikian

wilayah kajian kemampuan keuangan daerah mencakup aspek hak yaitu pendapatan serta aspek kewajiban yaitu belanja.

2.2 Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2001) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia" penerbit BBPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjelaskan bahwa Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan ataupun program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja pada organisasi sektor publik dilihat dari anggaran sebagai mekanisme yang mengatur prioritas dan alokasi belanja daerah dalam satu periode tertentu.

Sedangkan Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber–sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sestem pemerintahan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung kepada pemeritahan pusat dan mempunyai keluasaan di dalam menggunakan dana–dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas–batas yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk mencapat 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002)

Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

Dalam organisasi pemerintahan dalam pengukuran kinerja dapat mengunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio surplus/defisit.

Rasio Kemandirian merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio Pertumbuhan belanja digunakan untuk mengukur besarnya kemanpuan suatu pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu keperiode berikutnya, serta digunakan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan belanja apakah pertumbuhan tersebut rasional.

Rasio Efektifitas mengambarkana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncankan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rasio Ketergantungan Daerah merupakan rasio yang mengambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka akan semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ataupun propinsi.

Surplus/defisit merupakan rasio yang mengambarkan tingkat pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

2.3 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Sriyana (2007) dalam UNISIA Vol XXXII No. 72 dengan judul " Analis Kapasitas Fiskal Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul menjelaskan bahwa menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mendifinikasikan APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggrann pendapatan dan anggaran belanja.

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas & plafon anggaran yang kemudian diserahklan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama- sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 APBD terdiri

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan ke rekening kas umum daerah yang dapat menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dan yang menjadi kelompok pendapatan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah berasal dari pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung serta iuran tersebut dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002).

b. Retribusi daerah

Yaitu suatu pungutan yang dilakukan pemrintah daerah sebagi balasjasa atas pemakaian/pembayaran warga karena telah memperolah jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

c. Bagian Laba Usaha Milik Daerah

Yaitu berupa penerimaan pendapatan yang berasal dari penerimaan laba bersih badan usaha milik pemerintah daerah.

d. Pendapatan

Pendapatan pemerintah daerah yang antara lain berasaldari hasil penjualan barang milik negara, penjualan barang bekas, jasa giro.

a. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerahuntuk membiayai kebutuhan daerah yang di dapat dari penerimaan APBD. Dana perimbangan diperolah dari Dana alokasi umum , dan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisas. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

c. Dana lokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

d. Dana Bagi Hasil

Merupakan dana yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH sumber daya alam.

b. Belanja

Belanja daerah menurut pasal 26 PP No.58 Tahun 2005 pada ayat menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang–undangan.

Di dalam ayat 2 disebutkan belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk

melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial serta pengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah ini terjadi menjadi Belanja Adminitrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi hasil dan Belanja Tak Terduga.

1. Belanja Adminitrasi Umum / Belanja tidak langsung

   Belanja tidak langsung merupakan suatu kegiatan belanja pemerintah daerah yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan. Jenis pembelanjaan tidak langsung yaitu berupa belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan/Belanja langsung

   Belanja Pemerintah Daerah yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, bantuan sosial dan hibah.

3. Belanja Modal

   Belanja pemerintahan daerah yang meliputi belanja untuk membiayai kegiatan investasi yang akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya Jenis dari belanja langsung yaitu berupa belanja tanah, belanja peralatan, belanja gedung dan bangunan.

4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

   Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan bagian belanja daerah yang meliputi kegiatan pengalihan dana atau barang dari pemerintah daerah. Belanja ini meliputi kegiatan bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan dan organisasi kemasyarakatan.

5. Belanja Tak Terduga

   Belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana misalnya belanja untuk bencana alam dan bencana sosial. Contoh Konkrit yaitu Belanja pemerintah Yogyakarta yang mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca gempa dan merapi.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1998) dalam bukunya dengan judul " Teori Pertumbuhan Ekonomi, penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa pada tahun 2003–2004 perekonomian mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan Tahun 2003 sebesar 478 % dan pada tahun 2004 5,50 %.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat di hitung dari

perubahan nilai Produk Domestic Regional Bruto pada harga konstan dari tahun sekarang dengan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung mengunakan rumus

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelum $_t$

2.5 Pengganguran

Pertumbuhan ekonomi di daerah sangat di pengaruhi dengan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah tersebut. Dengan memiliki SDM yang produktif dapat membawa keberhasilan bagi pemeritah daerah setempat. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik apabila daerah tersebut memiliki banyak SDM akan tetapi kurang produktif atau lapangan kerja di daerah tersebut kurang memadai hal itu apabila tidak cepat ditanggulangi akan meningkatkan angka pengnganguran. Yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daaerah setempat.

Pengganguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu

usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak mungkin mendapat pekerjaan kerena sudah bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Pengganguran dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. Pengganguran Terbuka Merupakan jenis penganguran dimana tenaga kerja tersebut benar – benar tidak mempunyai pekerjaan. Dalam kata lain tenaga kerja tersebut tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan.
b. Pengganguran Terselubung Merupakan jenis penganguran dimana tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contohnya Kerja Part Time
c. Setengah Mengangur Merupakan jenis penganguran dimana tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja ini hanya berkerja kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Contohnya Pada Saat musim lebaran maka toko–toko di kawasan pasar Beringharjo akan mempekerjakan pegawai diluar pegawai tetap dan hanya dipekerjaan jika menjelang hari–hari libur, ataupun hari–hari besar.

Penganguran juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya

a. Penganguran Konjungtural merupakan penganguran yang diakibatkan oleh perubahan perikonomian contonnya: Indonesia mengalami krisis di tahun 1997– 1998 yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami krisis dan harus merumahkan para pegawainya hal itu membuat angka penganguran yang semakin tinggi.

b.Penganguran Struktural merupakan jenis pengganguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.

Pengganggguran ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Akibat kemajuan dan pengunaan teknologi
2. Akibat Kebijakan Pemerintah
3. Akibat permintaan berkurang

b. Penganguran Friksional merupakan penganguran yang muncul akibat ketidak sesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja.

c. Penganguran Musiman merupakan pengganguran yang muncul akibat pergantian musim.

d. Penganguran Teknologi merupakan pengganguran yang muncul akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.Contohnya: Saat ini dengan berkembangnya tekonologi banyak perusahaan-cperusahaan besar mengganti para pekerjanya dengan mengunakan mesin. Sehingga para pekerja yang dipekerjakan hanya

sedikit yaitu sebagai operator dari mesin tersebut. contoh PT Sosro dan Indomie.

e. Penganguran Siklus merupakan pengganguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian

Pengganguran merupakan masalah yang sangat serius yang akan berdampak terhadap menurunnya tingkat pertumbuhan daerah yang akan mengakibatkan penurunan perekonomian pertumbuhan nasional. Dengan menurunnya pertumbuhan nasional dan daerah maka alokasi dana untuk Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang terkandung dalam indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sehingga sumber daya manusia yang ada saat ini tidak mampu bersaing sehingga tinggkat pendapatan menurun hal ini akan menambah tingkat kemiskinan.

2.6 **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia yang berkualitas selama ini menjadi isi utamaketika berbagai pihak berbicara mengenai tujuan pembangunan yang akan dicapai. IPM mencakup 3 aspek kebutuhan dasar manusia yaknikesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Tiga aspek ini menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan, serta beeentrampilan, serta memiliki pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Dalam studi yang dilakukan di Korea Selatan oleh lee(2003) dalam Sasana (2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara

pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Korea. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan makan sumber daya manusia akan lebih dapat berkembang dan dapat memgembangkan pembagunan daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membawa dampak postif terdapat penurunan pengganguran dan kemiskinan.

2.7Kemiskinan

Saat ini Kemiskinan merupakan isu global yang melanda semua negara di belahan bumi manapun. Fakta yang diungkapkan oleh Bank Dunia pada tahun 2003 dalam ada sedikitnya 3 Milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan yaitu dengan pendapatan kurang daro US $ 2 Per/hari. Di Indonesia kemiskinan menjadi masalah utama dalam pertumbuhan ekonomi, Tahun 2004 presentase penduduk miskin di indonesia mencapai 36 juta atau 17% dari total penduduk. Bahkan jika menggunakan garis kemiskinan hampir 30% penduduk indonesia berada di dalam garis kemiskinan. Untuk menghilangkan atau mengurangi angka kemiskinan di tanah air diperlukan suatu kebijakan yang tepat.

Ada 3 pilar utama yang digunakan dalam mengurangi kemiskinan

1. Penetapkan Pemerintahan yang baik (Good Govermance).
2. Pembangunan.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah–daerah

2.8 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran, Indeks Pembangun Manusia, Kemiskinan.

Dalam Penelitian yang dilakukan Ardi Hamsah (2008) Dengan Judul Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi menjelaskan kemandirian dan pengolahan secara ekonomi, efektif dan efisiensi suatu daerah atau wiayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengolaan daerah tersebut. Disamping itu diharapkan aparatur daerah secara inisiatif dan kreatif dalam mengolala daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengganguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

2.9 Penelitian terdahulu

Kinerja Keuangan, Pertumbuhan ekonomi, Pengganguran, dan Kemiskinan, sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu.

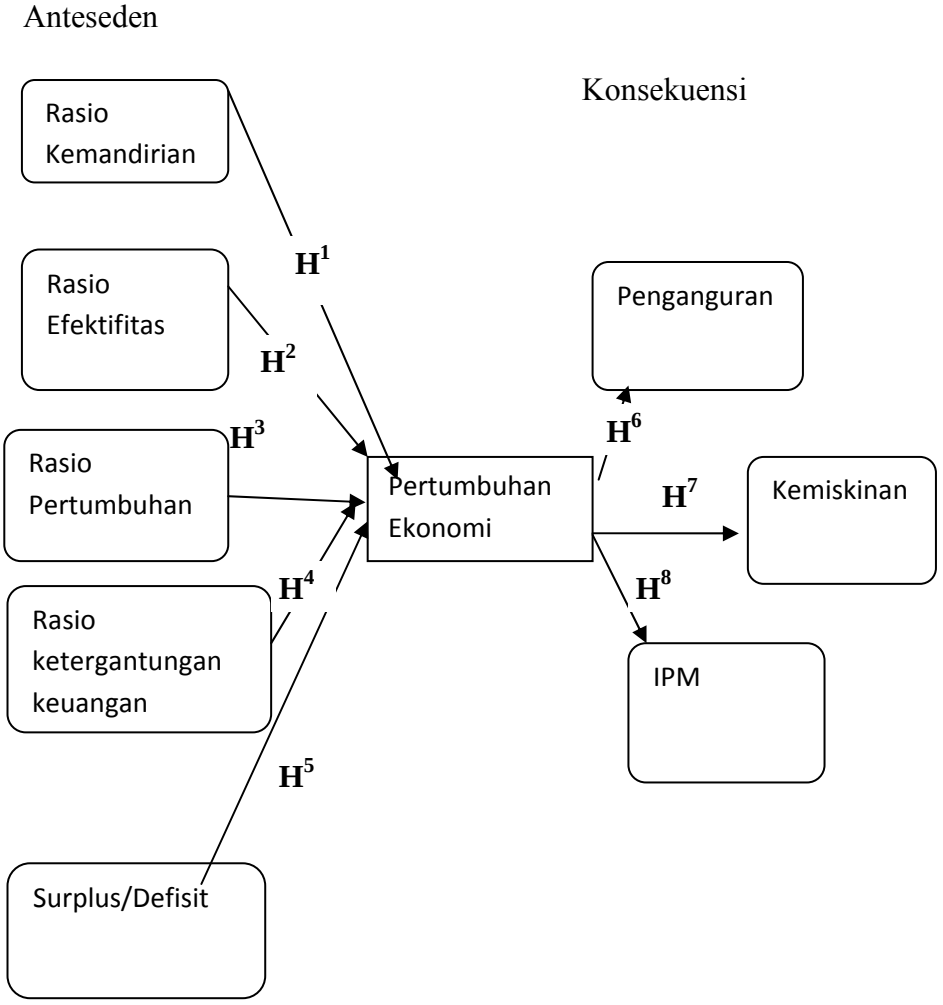
Nurhaeni dan Hamzah (2009) dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Vol. 9 No. 1 Januari dengan judul Pengaruh Rasio kinerja keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengganguran dan

Kemiskinan. Dalam penelitian tersebut peneliti mengunakan rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, rasio kemandirian 3, rasio efektifitas penerimaan, rasio efektifitas pengeluaran, rasio keserasian rutin, rasio keserasian pembangunan, rasio pertumbuhan penerimaan dan rasio pertumbuhan pengeluaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio kemandirian 2 dan efektifitas penerimaan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio kinerja tidak dapat digunakan untuk memprediksi investasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengganguran tetapi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.Variabel investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan pengganguran.

Ardi Hamzah (2008) mengungkapkan bahwa rasio kinerja berupa rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh. Pengujian pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengganguran sedangkan terhadap kemiskinan berpengaruh negatif.

\

2.10Model Penelitian



2.11Pengembangan Hipotesis

D.1 Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni dan Hamzah (2009) mengenai pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pengganguran dan kemiskinan, bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan PAD terhadap pendapatan total. Semakin meningkat porsi tersebut maka akan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_1:Kinerja Keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D.2 Kinerja Keuangan (rasio efektifitas)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni dan Hamzah (2009) dengan judul "Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran, dan Kemiskinan. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa rasio kemandirian 2 dan rasio efektifitas penerimaan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin efektif penerimaan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin naik. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_2:Kinerja Keuangan berupa rasio efektifitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D.3 Rasio Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan APBD)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) dalam Mahmudi dan Restiningrum (2008). Menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan belanja misalnya belanja investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menemukan adanya korelasi yang kuat antara belanja modal pada infrastruktur terhadap tingkat desentralisasi (Rasio Kemandirian). Alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_3:Kinerja Keuangan berupa rasio Pertumbuhan APBD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D.4 Rasio Kinerja Keuangan (Rasio Ketergantungan)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni dan Hamzah (2009) dengan judul " Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran, dan Kemiskinan dijelaskan bahwa Rasio Kemandirian 1 yang merupakan perbandingan hutang dalam negeri dengan hibah dan pinjaman, Rasio Kemandirian 2 (Derajad Desentralisasi) yang merupakan penerimaan total nilainya 100% atau dapat dikatakan tingkat kemandiriaanya sangat tinggi sedangkan Rasio Kemandirian 3 (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah) nilainya

masih cukup tinggi 53% ini menunjukkan masih ada ketergantungan yang cukup tinggi. Dengan nilai ketergantungan yang cukup tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi karena Rasio Ketergantungan erat hubungan dengan pinjaman dan dari hutang maka pendapatan daerah banyak digunakan untuk pembayarahan hutang dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_4:Kinerja Keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D.5 Rasio Kinerja Keuangan (Surplus/Defisit)

Dalam Penelitian Ardi Hamsah (2008) yang berjudul "Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)" dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa realisasi belanja/pengeluaran yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima dengan begitu maka kelebihan/surplus dapat dialokasikan pada belanja lain atau proyek lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_5:Kinerja Keuangan berupa surplus/defisit berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D.6 Tenaga Kerja (pengganguran)

. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Okun Dalam Putong (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah pengganguran.

HA_6: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indek Pengganguran

D.7 Kemiskinan

Menurut Hadi Sasana (2009) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1,Juni, hal. 103-124 dengan judul "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah" menurut hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 3 yang menyatakan "Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat diterima karena secara stastistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis

HA_7: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

D.8 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Menurut Hadi Sasana (2009) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1,Juni, hal. 103-124 dengan judul "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah" menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Ramirez et al. (1998), bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia (human development). Serta mendukung studi Suharto (2005), bahwa secara global dan khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, memperluas akses seseorang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang meningkatkan angka melek hidup menjadi lebih tinggi sehingga SDM menjadi lebih produktif. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesispenelitian sebagai berikut.

HA_8: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indek Pembangunan Manusia.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

2.9 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah dengan

Jumlah 29 kabupaten dan 6 pemerintah kota. Dalam penelitian ini peneliti menggambil sampel 29 pemerintah dan 1 pemerintah kota. Dalam Penelitian ini peneliti tidak menggunakan 5 pemerintah kota karena ada data yang tidak lengkap. Periode Penelitian yang akan diteliti yaitu periode tahun 2006-2009.

2.10 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari buku-buku, arsip-arsip, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian.

Data dalam penelitian ini berupa data keuangan APBD beserta realisasinya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, indeks pertumbuhan manusia, serta kemiskinan yang terdapat pada Propinsi Jawa Tengah.

2.11 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik dokumentasi. Data peneltian diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang ada di Semarang serta yang ada di Yogyakarta.

2.12 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.

2.12.1 Rasio Kemandirian

Rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian dihitung dengan mengunakan perhitungan.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

2.12.2 Rasio Efektifitas

Rasio ini berhubungan dengan derajad keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio Efektifitas mengambarkana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncankan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rasio Efektifitas dihitung mengunakan rumus

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Menurut Medi (1996) dalam Budiarto (2007) apabila presentasi kinerja diatas 100% dikatakan sangat efektif,, 90% - 100% adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif, dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

3.4.3 Rasio Pertumbuhan APBD

Diukur dengan Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{Total Belanja Daerah}_{t} - \text{Total Belanja Daerah}_{t-1}}{\text{Total Belanja Daerah}_{t-1}} \times 100$$

Analisis Pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa

besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat menggangu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

3.4.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Daerah merupakan rasio yang mengambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka akan semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ataupun propinsi. Dan dalam penelitian ini, rasio ketergantungan keuangan daerah diukur dengan cara

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{total Pendapatan daerah}}$$

3.4.5 Surplus/Defisit

Yang dimaksud dengan surplus dalam suatu laporan

keuangan adalahselisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran. Sedangkan yang dimaksud defisit adalah merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran. Dan dalam penelitian ini dapat digunakan rumus:

Surplus/defisit = ∑ Pendapatan -– ∑ Belanja

3.4.6 Variabel Eksogen

Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah Variabel Kinerja Keuangan. Kinerja Keuangan dapat diukur dengan mengunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio pertumbuhan APBD, Rasio Ketergantungan, Rasio Surplus Defisit.

3.4.7 Variabel Endogen

Dalam Penelitian ini Variabel Endogen yaitu variabel Pengganguran, Indeks Pembangungan Manusia, Kemiskinan.

3.5 Teknik Pengujian Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik Penggujian Data dan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Structural EquationModelling* (SEM)/ model persamaan struktural. Penggunaan structural equation model dengan programnya dapat meningkatkan tekhnik analisis dalam riset sistem informasi. Program yang dipaakai dalam penelitian ini adalah AMOS (Analysis of Moment Structure) 6.0.SEM merupakan teknik *multivariate* yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan ketergantungan secara simultan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program AMOS 6.0

untuk menganalisis hubungan kausalitas dalam model struktural yang diusulkan.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1Stastistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskriptif atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maximal, dan standartd deviation.

3.6.2 Evaluasi Kriteria Goodness of fit

Selanjutnya dilakukan berbagai uji f**i**t index untuk mengukur derajat kesesuaianantara model dengan data yang diperoleh. Kriteria untuk menerima suatu model (data fit) dapat dilihat dalam tabel berikut: Kriteria Penerimaan Suatu Model

Goodness of Fit Index	Cut-Off Value
X^{2-} Chi Square	Diharapkan Kecil
RMSEA	≤ 0, 08
GFI	≥ 0, 09
AGFI	≥ 0, 09
CMIN/DF	≤ 2, 00
TLI	≥ 0, 95
CFI	≥ 0, 95

Uraian masing-Masing dari Goodness of Fit Index dapat dijelaskan sebagai berikur:

1. Uji *Chi-square statistic* (X2) untuk mengukur *overall fit*. Uji *Chi-square statistic* (X2) untuk mengukur *overal fit.* Nilai *chi-square* yang tinggi relatif terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa matrikkovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbedasecara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi (x), dan sebaliknya.
2. *Root Mean Square Error of Approximation* untuk mengkompensasi *Chi-square statistic* dalam sampel besar. Nilai RMSEA antara 0.05 sampai 0.08 merupakan ukuran yang dapat diterima.
3. *Goodness of Fit Index* mengukur proporsi tertimbang dari varian dalam matrik kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang terestimasikan. Nilai GFI yang tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya.
4. *Adjusted Goodness of Fit Index* untuk menguji diterima tidak suatu model. Nilai yang direkomendasikan adalah sama atau >0.09.
5. *CMIN/DF* dibagi dengan degree of freedomnya akan menghasilkan indeks CMIN/DF, yang umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya suatu model CMIN/DF merupakan statistik uji Chi-Square (X^2) dibagi derajat bebas

(DF) sehingga disebut x^2 relatif. Nilai x^2 relatif ≤ 2, 00 menunjukkan bahwa termasuk good fit.

6. *Tucker Lewis Index* untuk mengukur kelebihan suatu model dengan model yang lain. Nilai TLI yang direkomendasikan adalah sama atau >0.09.
7. CFI nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya suatu model adalah CFI ≥ 0, 095, dan nilai yang sangat mendekati menunjukkan very good fit.

3.6.3Model Persamaan

Berikut ini adalah persamaan-persamaan yangmerefleksikan pengujian hipotesis.

Persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta Y1 + \beta Y2 + \beta Y3 + \beta Y4 + \beta Y5 + \varepsilon$$

$$Y2 = \alpha + \beta Y1 + \varepsilon$$

$$Y3 = \alpha + \beta Y1 + \varepsilon$$

$$Y4 = \alpha + \beta Y1 + \varepsilon$$

Keterangan

Y1	= Pertumbuhan Ekonomi
Y2	= Pengganguran
Y3	= Indeks Pembangunan Manusia
Y4	= Kemiskinan
X1, X2, X3, X4, X5	=RasioKemandirian, efektifitas, pertumbuhan APBD, ketergantungan, surplus/defisit
ε	= Tingkat Kesalahan (error)

3.6.4 Hipotesis Pengujian

Formulasi Peneliti mengacu pada hipotesis teori, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) yang kemudian akan dilakukan pengujian atas Hipotesis Nol (Ho) tersebut untuk membuktikan apakah Hipotesis Nol (Ho) tersebut ditolak atau gagal ditolak. Hipotesis tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut :

1. Ho1: ($\beta 1 \leq 0$) : Kinerja Keuangan berupa rasio kemandiriantidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

   Ha1: ($\beta 1 > 0$) : Kinerja Keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Ho2: ($\beta 2 \leq 0$) : Kinerja Keuangan berupa rasio efektifitas tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

   Ha2: ($\beta 2 > 0$) : Kinerja Keuangan berupa rasio efektifitasberpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Ho3: ($\beta 3 \leq 0$): Kinerja Keuangan berupa rasio Pertumbuhan APBD tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

   Ha3: ($\beta 3 > 0$) :Kinerja Keuangan berupa rasio Pertumbuhan APBDberpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Ho4: ($\beta_4 \leq 0$) :Kinerja Keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

   Ha4: ($\beta_4 > 0$) : Kinerja Keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

5. Ho5: ($\beta_5 \leq 0$) : Kinerja Keuangan berupa surplus/defisit tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

   Ha5: ($\beta_5 > 0$) : Kinerja Keuangan berupa surplus/defisit berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

6. Ho6: ($\beta_6 \leq 0$) : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap Indek Pengganguran

   Ha6: ($\beta_6 > 0$) : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indek Pengganguran

7. Ho7: ($\beta_7 \leq 0$) : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

   Ha7: ($\beta_7 > 0$) : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

8. Ho8: ($\beta_8 \leq 0$) :Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap Indek Pembangunan Manusia.

   Ha8: ($\beta_8 > 0$) : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indek Pembangunan Manusia

3.6.5 Keputusan Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model AMOA, dapayt dilihat dari nilai Probability (sig)

1. Jika Probabilitas (sig) ≤ 0, 05, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen.
2. Jika Probabilitas (sig)> 0, 05, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel eksogen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai apakah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi, serta apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indek pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran, dilakukan analisis data dengan program AMOS. 6. Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dijelaskan tentang gambaran / deskriptif tentang data-data penelitian.

4.1 Analisis Deskriptif

Berikut akan dijelaskan statistik deskpriptif yiatu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kinerja keuangan daerah, pertumbuhan PDRB, Indek pembangunan manusia, Kemiskinan, dan pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	120	0,04	0,13	,08	,02
Efektifitas	120	0,80	2,61	1,23	,24
Pertumbuhan	120	-6,65	57,50	20,45	14,76
Ketergantungan	120	0,43	0,84	,71	,06
Surplus_def	120	-143.298.814,00	129.520.915,00	13.388.242,29	43.629.788,63
PE	120	2,30	6,19	4,56	,78
Pengangguran	120	5.766,00	101.083,00	36.577,91	20.162,25
Kemiskinan	120	9,60	34,43	20,30	5,84
IPM	120	65,90	76,37	70,71	1,88
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 0,08 atau sebesar 8% dan standar deviasi sebesar 0,02. Hal ini berarti rata-rata kemandirian pendapatan daerah yang berasal dari PAD rata-rata adalah 8% dari bantuan pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten di propinsi Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai seluruh anggaran belanjanya.

Deskriptif terhadap rasio efektifitas yaitu perbandingan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD memiliki rata-rata sebesar 1,23 atau 123% dan standar deviasi sebesar 0,24. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah sudah efektif.

Hasil deskriptif terhadap pertumbuhan APBD menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang positif dengan besarnya rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 20,45% per tahun dengan standar deviasi sebesar 14,76%.

Deskriptif terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 0,71 atau sebesar 71% dan standar deviasi sebesar 0,06. Hal ini berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota se pripinsi Jawa Tenggah masih cukup tinggi, dimana 71% ABPD masih dibiayai dari Dana Alokasi Umum, yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil dekriptif terhadap Surplus/Defisit yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja daerah selama periode anggaran rata-rata adalah sebesar Rp.13.388.242,29 ribu dan standar deviasi sebesar 43.629.788,63. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah memiliki selisih pengeluaran, dibandingkan dengan besarnya penerimaan daerah serta pembiayaan bersih yang cukup besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan untuk APBD tahun berikutnya.

Deskriptif terhadap laju PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 4,56% dan standar deviasi sebesar 0,78. Hasil ini berarti rata-rata pemerintah daerah kabupatan/kota di propinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan PDRBnya yang ditunjukkan dengan laju PDRB positif.

Hasil deskriptif pada tingkat pengangguran menunjukkan nilai rata-rata sebesar 36.577,91 orang dan standar deviasi sebesar 20.162,25 orang. Hal ini berarti rata-rata penduduk di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah yang tidak bekerja adalah sebesar 36.577,91 orang dari seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal maupun di sektor formal.

Deskriptif terhadap Kemiskinan yaitu memiliki rata-rata sebesar 20,30% dan standar deviasi sebesar 5,84. Hasil ini berarti tingkat kemiskinan rata-rata di Kabupaten atau kota se propinsi Jawa Tengah adalah sebesar 5,84%.Angka ini cukup rendah, sehingga kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah telah mampu menurunkan angka kemiskinan.

Hasil deskriptif terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah adalah sebesar 70,71% dan standar deviasi sebesar 1,88%. Hal ini berarti rata-rata indeks pembangunan manusia di kabupaten/ kota se propinsi Jawa Tengah termasuk dalam kriteria yang cukup / menengah karena berada pada interval 50% – 79,9%. Artinya rata-rata setiap orang memiliki penghasilan yang lebih cukup karena pendidikannya lebih cukup tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang.

4.2. Analisis Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik AMOS6.0. sebelum dilakukan analisis AMOS 6.0 terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan model (goodness of fit)

4.3. Uji Kebaikan Model

Untuk mengetahui kriteria model yang baik (*Goodness of Fit*) digunakan:. Uji Chi Square, *Root Mean Squre Error of Approximation,* Goodness of fit Index, Adjusted Goodness of fit Index dan *Tucker Lewis Index.* Uji kebaikan model ini menggunakan software Amos versi 6.0. Berikut ini *goodness of fit index* yang dihasilkan setelah pengujian :

Tabel 4.2

Goodness of Fit Index

Goodness of Fit Index	**Hasil**	***Cut Off Value***	***Keterangan***
Chi Square	112.861	Diharapkan kecil	
Probability	0000	≥0,05	Kurang
RMSEA	0,060	≤0,08	Fit
GFI	0,915	≥0,90	Fit
CFI	0,993	≥0,90	Fit
TLI	0,913	≥0,90	Fit

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2012

Nilai X^2 – Chi Square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.Hal ini menunjukkan bahwa Ho yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara matrik kovarians sampel dengan matrik kovarians populasi yang diestimasi

tidak dapat diterima. Artinya matrik kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah tidak sama, sehingga model dinyatakan kurang fit. Akan tetapi, tidak menjadi masalah karena menurut hasil pengujian yang lain telah memenuhi kriteria model

The Root Mean Square Error of Approximation – RMSEA, indeks yang digunakan untuk mengkompensasi Chi Square Statistik dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan *goodnes of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasikan $\leq$ 0,08, sementara hasil pengujian pada model adalah sebesar 0,060 < 0,08 sehingga modelnya adalah baik

Berdasarkan analisis terhadap *goodnes of fit* – GFI mencerminkan tingkat kesesuian model secara keseluruhan. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan GFI > 0,90. Hasil menunjukkan nilai GFI sebesar 0,915>0,9, sehingga model memiliki fit yang baik.

Indek CFI (*Comparative Fit Index*) memiliki keunggulan tidak bisa dipengaruhi oleh ukuran sampel karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model (Hulland, et al., 1996; Tanaka, 1993 dalam Ferdinand, 2005:60). Nilai CFI yang direkomendasikan agar dapat diterima adalah >0,9. Hasil penelitian menunjukkan nilai CFI sebesar 0,993 yang nilainya lebih besar dari 0,9, sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki fit yang diterima.

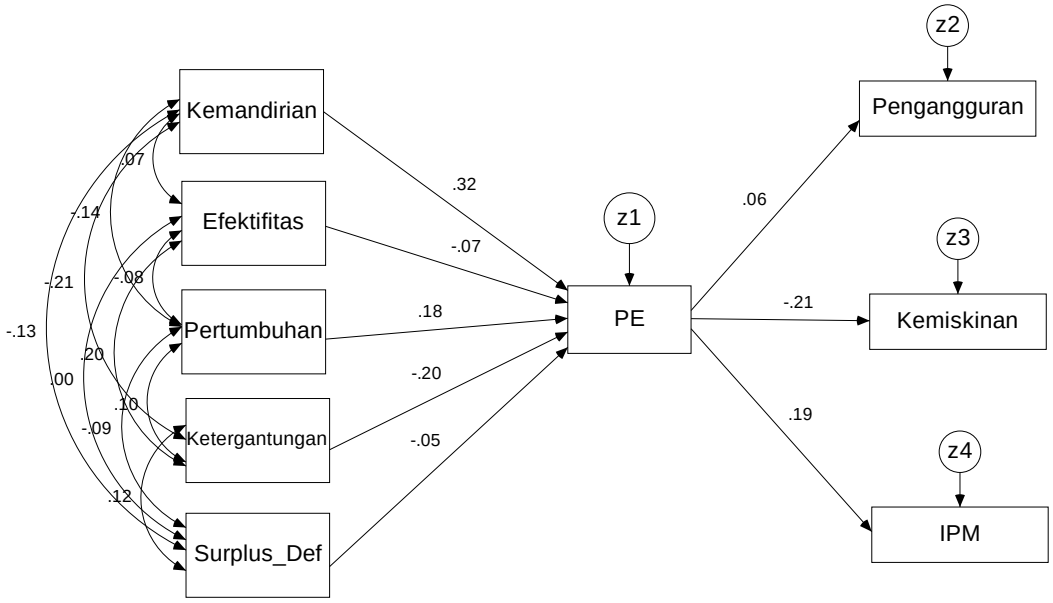
Tucker Lewis Index – TLI merupakan alternatif *incremental fit index* yang membandingkan model yang diuji dengan *baseline*. Nilai yang

direkomendasikan sebagai tingkat kesesuaian yang baik adalah ≥ 0,90. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai TLI sebesar 0,913 sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat kesesuaian berada pada kriteria baik

Menurut Ghozali (2005) menyatakan bahwa jika satu parameter yang dihasilkan tidak mampu menjelaskan tentang kesesuaian model, maka dapat diukur dengan model fit yang lain. Dari analisis kesesuaian model tersebut menunjukkan bahwa hanya ditinjau dari nilai Chi Square yang menyatakan model Jalur yang digunakan tidak baik (tidak fit). Sedangkan dari hasil pengujian yang lain yang ditinjau dari nilai GFI, CFI, RMSEA, dan TLI, yang menunjukkan model yang baik. Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan Ghozali, maka model jalur yang diajukan dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi *Goodness of Fit* (Model fit yang baik)

4.4 Pengujian Struktur Model

Pengujian hipotesis dengan Analisis SEM diperoleh hasil jalur sebagai berikut :



Gambar 4.1. Hasil Diagram Jalur Output AMOS

Pengujian model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, pertumbuhan APBD, Ketergantungan keuangan daerah, Surplus/Defisit terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan guna menjawab hipotesis penelitian.Berikut adalah hasil pengujian model.

Tabel 4.3

Estimasi Hasil Analisis SEM

			Estimate	C.R.	P	P
PE	<---	Kemandirian	0,318	3,717	0,000*	H1 diterima
PE	<---	Efektifitas	-0,067	-0,795	0,426	H2 ditolak
PE	<---	Pertumbuhan	0,184	2,193	0,028*	H3 diterima
PE	<---	Ketergantungan	-0,202	-2,317	0,020*	H4 diterima
PE	<---	Surplus_Def	-0,046	-0,547	0,585	H5 ditolak
Pengangguran	<---	PE	0,058	0,635	0,525	H6 ditolak
Kemiskinan	<---	PE	-0,215	-2,401	0,016*	H7 diterima
IPM	<---	PE	0,192	2,134	0,033*	H8 diterima

Sumber: Output AMOS 6.0

4.5 Pengaruh Kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif pertama bahwa "**Kinerja Keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,318 dengan nilai p-value (0,000< 0,05). Hal ini berarti rasio kemandirian berpengaruh secara

langsung dan signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini **dapat didukung**.Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio kemandirian pada keuangan daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / kota di propinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2008) yang menemukan menemukan bukti empiris bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, berarti sumber pendapatan internal yang berasal dari PAD semakin kuat maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan sumber pendapatan asli daerah yang semakin besar, menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memiliki kemampuan dalam mengelola potensi daerah yang ada, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin rendah, dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonominya.

4.6 Pengaruh Efektifitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis alternatif kedua menyatakan "**Kinerja Keuangan berupa rasio efektifitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,067 dengan nilai p-value (0,426>0,05). Hal ini berarti rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**.Ini dikarenakan pemerintah daerah belum berusaha secara maksimal untuk mencapai target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata PAD yang direalisasikan 123% dari PAD yang ditargetkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ kota se propinsi Jawa Tengah. Artinya pemerintah daerah dalam menargetkan nilai perolehan PAD hanya didasarkan pada PAD tahun sebelumnya, tidak didasarkan pada potensi-potensi yang ada, sehingga target yang dianggarkan jauh dari realisasi yang ada. Walaupun nilai realisasi PAD jauh lebih besar, namun 23% kelebihan PAD menunjukkan ketidakmampuan aparat dalam menentukan target PAD. Sehingga target tidak tercapai dan mengakibatkan penerimaan PAD yang didapatkan tidak maksimal. Seperti yang kita ketahui, PAD tersebut digunakan untuk mendanai program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuha ekonomi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pemerintah daerah di Jawa Tengah kurang berusaha untuk mencapai target penerimaannya. Salah satunya adalah para pegawainya memiliki pekerjaan yang lain sehingga

kurang maksimal dalam pekerjaan utama sebagai pegawai pemerintah.

4.7 Pengaruh Pertumbuhan APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif ketiga bahwa "**Kinerja Keuangan berupa rasio Pertumbuhan APBD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,184 dengan nilai p-value (0,028< 0,05). Hal ini berarti pertumbuhan APBD berpengaruh secara signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini **dapat didukung**.

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.

Pertumbuhan APBD yang tinggi tentuknya, sebagai modal awal untuk melakukan pembangunan daerah.Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperlihatkan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi SDA dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4.8 Pengaruh Ketergantungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif keempat bahwa "**Kinerja Keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,202 dengan nilai p-value (0,020< 0,05). Hal ini berarti kinerja keuangan berdasarkan rasio ketergantungan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurhaeni dan Hamzah (2009) yang menemukan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah nilainya masih cukup tinggi 53% ini menunjukkan masih ada ketergantungan yang cukup tinggi. Dengan nilai ketergantungan yang cukup tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi karena Rasio Ketergantungan erat hubungan dengan pinjaman dan dari hutang maka pendapatan daerah banyak digunakan untuk pembayarahan hutang dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator dari keberhasilan otonomi daerah, adalah menurunnya nilai ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah akan cenderung menurunkan dana perimbangan dan mengoptimalkan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah. Jika dilihat dari rata-rata rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah sebesar 71% menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini berarti pemerintah belum mampu mengoptimalkan penerimaan dari daerah senidiri yang berupa PAD, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonominya.

4.9 Pengaruh Surplus/Defisit terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa "**Kinerja Keuangan berupa surplus/defisit berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi Surplus/Defisit terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,046 dengan nilai p-value (0,585> 0,05). Hal ini berarti Surplus/Defisit tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini **tidakdapat didukung**.

Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah belum mampu menjaga secara konsisten nilai Surplus/Defisit yang ada dari tahun ke tahun, sehingga belum dapat dijadikan pertimbangan sebagai penerimaan penting dalam anggaran pemerintah daerah. Jika dilihat dari data-data pada lampiran, tahun 2008 terjadi defisit pada sebagian besar kabupaten/kota yang disebabkan karena adanya krisis moneter / krisis ekonomi global, yang menyebabkan alokasi belanja daerah mengalami peningkatan cukup tajam menyesuaiakan inflasi yang terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran.

4.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa "**Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indek Pengganguran**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah sebesar 0,058 dengan nilai p-value (0,525> 0,05). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.Dengan demikian hipotesis keenam dalam penelitian ini **tidakdapat didukung**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ardi Hamzah (2008) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran yaitu dalam artian bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat angka pengganguran juga semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi ketika banyak lapangan kerja yang dibuka tenaga kerja yang terserap berasal dari luar daerah tersebut sehingga pengganguran didaerah tersebut tinggi. Sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan karena persentase pengangguran di wilayah propinsi Jawa Tengah ini tergolong sangat rendah. Daerah alam yang sangat potensial dan masih cukup luas telah membuka lapangan usaha bagi secara formal maupun informal sehingga besarnya pertumbuhan ekonomi ini tidak berdampak pada jumlah pengangguran yang terjadi. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa persentase pengangguran di wilayah propinsi Jawa Tengah hanya sebesar 36,677 orang.

4.11 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menyatakan bahwa "**Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar -0,215 dengan nilai p-value (0,016< 0,05). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.Dengan demikian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini **dapat didukung**.Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka jumlah kemiskinan di propinsi Jawa Tengah semakin menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ardi Hamzah (2008) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin.

]

4.12 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks pembangunan manusia

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini menyatakan bahwa "**Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indek Pembangunan Manusia**". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap IPK adalah sebesar 0,192 dengan nilai p-value (0,033< 0,05). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.Dengan demikian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini **dapat didukung**.Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka indeks pembangunan manusia di propinsi Jawa Tengah semakin meningkat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1966) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia dan sebaliknya. Di satu sisi pembangunan manusia yang berkelanjutan perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan sisi lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga perlu didukung oleh pembangunan manusia (SDM) yang memadai pula.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk. Banyak studi menyebutkan, peningkatan pendapatan mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan. Studi di Brazil, Chile dan Nikaragua menunjukkan, bahwa peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan beberapa indikator tingkat kesehatan, seperti rasio usia dengan tinggi badan serta angka harapan hidup ketika lahir (UNDP, 1996). Studi-studi lain juga menyebutkan, peningkatan pendapatan mempengaruhi tingkat pendidikan. Angka perkiraan di Brazil menyebutkan, bahwa 10% peningkatan pendapatan mempengaruhi 5% – 8% peningkatan pendidikan. Begitu juga di Pakistan, terdapat hubungan yang erat antara peningkatan pendapatan dengan rata-rata tahun pendidikan yang dapat diselesaikan.

Dari hasil pengujian di atas dapat dijelaskan bahwa rasio keuangan kemandirian, pertumbuhan APBD, dan ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti ada pengaruh tidak langsung kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil pengaruh langsung dan tidak langsung dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	Surplus_Def	Ketergantungan	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	-.042	-.198	.196	-.064	.321	.000
IPM	.000	.000	.000	.000	.000	.192
Kemiskinan	.000	.000	.000	.000	.000	-.215
Pengangguran	.000	.000	.000	.000	.000	.058

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	Surplus_Def	Ketergantungan	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.000	.000	.000	.000	.000	.000
IPM	-.008	-.038	.038	-.012	.062	.000
Kemiskinan	.009	.043	-.042	.014	-.069	.000
Pengangguran	-.002	-.012	.011	-.004	.019	.000

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pengaruh langsung kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 32,1% dan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi sebesar kemiskinan sebesar -21,5%. Artinya kemandirian daerah memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -6,9%. Begitu juga dengan rasio pertumbuhan APBD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -4,2% dan pengaruh tidak langsung ketergantungan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3%. Dengan demikian kemandirian daerah semakin tinggi, pertumbuhan APBD yang semakin meningkat dan rendahnya ketergantungan daerah maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat sehingga akan menurunkan angka kemiskinan.

Hasil analisis pengaruh tidak langsung kemandirian terhadap terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, pengaruh tidak langsung rasio pertumbuhan APBD sebesar 3,8% dan pengaruh tidak langsung rasio ketergantungan terhadap IPM sebesar -3,8%. Dengan demikian Indeks pembangunan manusia akan meningkat jika rasio keuangan daerah yang diukur dari rasio kemandirian daerah dan pertumbuhan APBD yang semakin meningkat dan serta menurunnya tingkat ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan rasio kemandirian daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi
2) Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan rasio efektivitas terhadap Pertumbuhan ekonomi
3) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pertumbuhan APBD terhadap Pertumbuhan ekonomi.
4) Terdapat pengaruh negatif tingkat ketergantungan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.
5) Tidak terdapat pengaruh positif secara signifikan Surplus/Defisitterhadap Pertumbuhan ekonomi.
6) Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.
7) Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan
8) Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya obyek penelitian yang hanya terbatas pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 30 kabupaten/kota, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk kabupaten/kota di propinsi lainnya. Selain itu periode penelitian tahun 2008 yang merupakan kondisi krisis ekonomi global ternyata mempengaruhi nilai defisit anggaran, sehingga menyebabkan tidak terbuktinya variabel surplus defisit dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hendaknya dapat meningkatkan rasio kemandirian, dan pertumbuhan APBD dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah (PAD), sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan menurunkan angka kemiskinan di propinsi Jawa Tengah.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini dengan memperbanyak sampel penelitian dan memperluas obyek penelitian , misalnya kabupaten/ kota se pulau Jawa dengan memasukkan kondisi krisis tahun 2008 misalnya dengan dummy variabel 0 = sebelum krisis 2008 dan 1 =sesudah krisis 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim. 2007. Peran *Anggaran Pemerintah Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan diIndonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.10.

Arsyad, Lincoln.1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik dan Depsos. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Di Indonesia,* Jakarta: BPS. Departemen.

Badan Pusat Statistik , 2004. *Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2004*. Semarang: BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Penerbi BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.

Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.

Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah Surabaya.

Darwanto , Yulia Yustika. 2007. *Pengaruh Pertumbuha Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* . SNA X UNHAS Makasar, hal: 26-28.

Domai, Tjahjanulin. 2002. *Makalah Reiventing Keuangan Daerah*. Fakultas Ilmu Admintrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Ferdinand, Augusty. 2005. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang:FE UNDIP.

Ghozali, Iman. 2005. *Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos Ver. 6.* Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

Hamzah, Ardi. 2008. *Analisis Kinerja keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, penganguran, dan kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di propinsi Jawa Timur).* Simposium Nasional Akuntansi 1.

Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Penerbit UPP Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

Lim, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu (2000) *"Fiskal Decentralization and Economic Growth in China, " Economic Development and Cultural Change Chicago.* Vol 49. Hal : 1-21.

Mahmudi dan Restiningrum. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli*

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap

Pengalokasian Belanja Modal.jurnal aplikasi bisnis volume 7.

Mutiara, Maimunah dan Rusdi Akbar. 2008. *Fly Paper pada Dana Alokasi Umum dan*

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra, jurnal riset akuntnasi indonesia volume 11, hal: 37-51.

Mamesah, *Sistem Admintrasi Keuangan Daerah*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mardiasmo, 2000, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Nurhaeni, Siti dan Ardi Hamzah. 2009. *Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengganguran, dan Kemiskinan Studi Pada APBN Tahun 2002–2006, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen;* Vol.9 No 1, Hal: 111-112.

Priyo Hari Adi. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*.Simposium Nasional Akuntansi 9.

Pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 *tentang Belanja Daerah.*

Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi 2. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ramirez A., G. Rannis, and F. Stewart, 1998, *Economic Grownt and Human Capital*, QEH Working Paper No. 18.

Sriyana, Jaka. 2009. *Analisis Kapasitas Fiskal Daerah : Studi Kasus Kabupaten Gunung Kidul.unisia vol XXX11 No.72*

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama.

Sasana, Hadi. 2009. *Peran disentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah*. Jurnal ekonomi pembangunan vol.10 hal: 103-124.

Todaro, MP, *Economic Development Sixth Edition*, Published by Newyork University, 1997.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 *tentang Pemerintah Daerah.*

United Nations Development Program (UNDP), 1966

World Bank. 2003. *Sustainable Development In A Dinamic World; Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life*. World Development Report 2003. Oxford University Press.

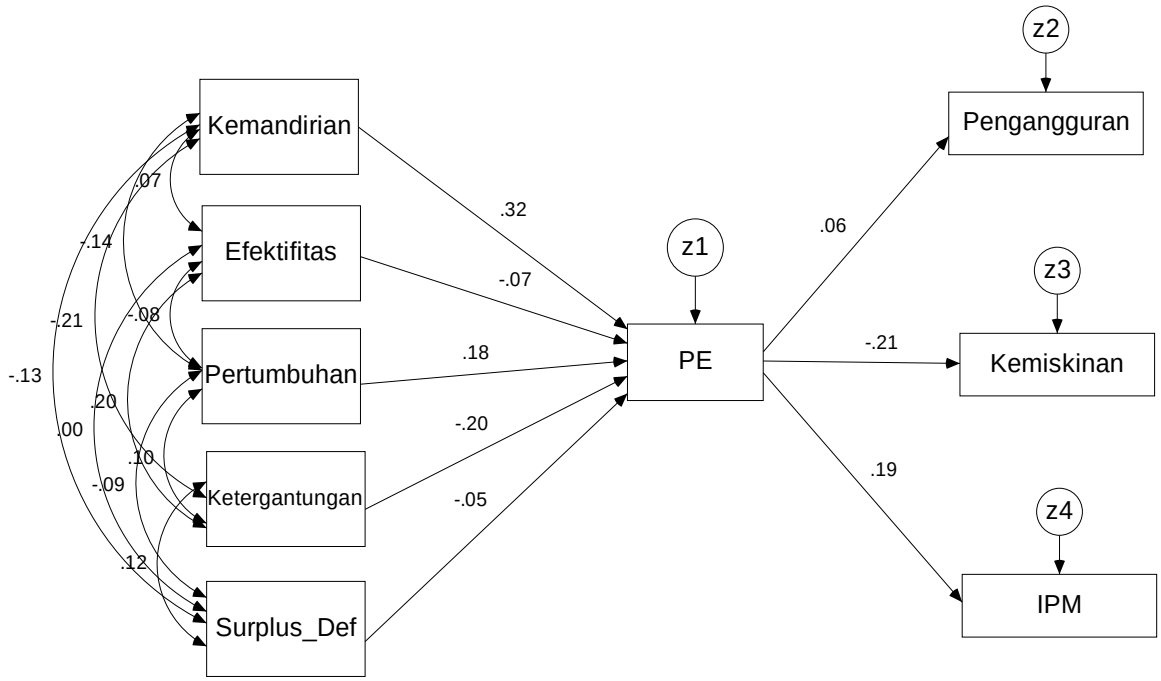
Wong, John D. 2009. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Bugeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816

Worl Bank. 2001. Indonesia: *Constructing a New Strategy for Poverty Reduction*. Report No. 23028- IND. October.

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	120	0,04	0,13	,08	,02
Efektifitas	120	0,80	2,61	1,23	,24
Pertumbuhan	120	-6,65	57,50	20,45	14,76
Ketergantungan	120	0,43	0,84	,71	,06
Surplus_def	120	-143.298.814,00	129.520.915,00	13.388.242,29	43.629.788,63
PE	120	2,30	6,19	4,56	,78
Pengangguran	120	5.766,00	101.083,00	36.577,91	20.162,25
Kemiskinan	120	9,60	34,43	20,30	5,84
IPM	120	65,90	76,37	70,71	1,88
Valid N (listwise)	120				



D:\M Y D O C U M E N T S 2012\widy data AMOS PAD JATENG\data amios.amw

Analysis Summary

Date and Time

Date: Monday, March 12, 2012
Time: 4:04:26 PM

Title

data amios: Monday, March 12, 2012 04:04 PM

Groups

Group number 1 (Group number 1)

Notes for Group (Group number 1)

The model is recursive.
Sample size = 120

Variable Summary (Group number 1)

Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables
PE
Pengangguran
Kemiskinan
IPM
Observed, exogenous variables
Kemandirian
Efektifitas
Pertumbuhan
Ketergantungan
Surplus_Def
Unobserved, exogenous variables
z1
z2
z3
z4

Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model:	13
Number of observed variables:	9
Number of unobserved variables:	4
Number of exogenous variables:	9
Number of endogenous variables:	4

Parameter summary (Group number 1)

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	4	0	0	0	0	4
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	8	10	9	0	0	27
Total	12	10	9	0	0	31

Models

Default model (Default model)

Notes for Model (Default model)

Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments:	45
Number of distinct parameters to be estimated:	27
Degrees of freedom (45 - 27):	18

Result (Default model)

Minimum was achieved
Chi-square = 112.861
Degrees of freedom = 18
Probability level = .000

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PE	<---	Kemandirian	14.358	3.863	3.717	***	
PE	<---	Efektifitas	-.205	.257	-.795	.426	
PE	<---	Pertumbuhan	.003	.001	2.193	.028	
PE	<---	Ketergantungan	-2.676	1.155	-2.317	.020	
PE	<---	Surplus_Def	.000	.000	-.547	.585	
Pengangguran	<---	PE	1493.872	2351.522	.635	.525	
Kemiskinan	<---	PE	-1.601	.667	-2.401	.016	
IPM	<---	PE	.459	.215	2.134	.033	

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate
PE	<---	Kemandirian	.318
PE	<---	Efektifitas	-.067
PE	<---	Pertumbuhan	.184
PE	<---	Ketergantungan	-.202
PE	<---	Surplus_Def	-.046

			Estimate
Pengangguran	<---	PE	.058
Kemiskinan	<---	PE	-.215
IPM	<---	PE	.192

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	Surplus_ Def	Ketergantungan	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	-.046	-.202	.184	-.067	.318	.000
IPM	-.009	-.039	.035	-.013	.061	.192
Kemiskinan	.010	.043	-.040	.015	-.068	-.215
Penganggguran	-.003	-.012	.011	-.004	.019	.058

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	Surplus_ Def	Ketergantungan	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	-.046	-.202	.184	-.067	.318	.000
IPM	.000	.000	.000	.000	.000	.192
Kemiskinan	.000	.000	.000	.000	.000	-.215
Penganggguran	.000	.000	.000	.000	.000	.058

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	Surplus_ Def	Ketergantungan	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.000	.000	.000	.000	.000	.000
IPM	-.009	-.039	.035	-.013	.061	.000
Kemiskinan	.010	.043	-.040	.015	-.068	.000
Penganggguran	-.003	-.012	.011	-.004	.019	.000

Modification Indices (Group number 1 - Default model)

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	27	112.861	18	.000	6.270
Saturated model	45	.000	0		
Independence model	9	170.245	36	.000	4.729

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	9543216608.905	.915	.809	.826
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	7543220152.464	.837	.871	.789

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.737	.626	.877	.913	.993
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.500	.169	.147
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	94.861	65.009	132.216
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	134.245	97.361	178.669

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	.948	.797	.546	1.111
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	1.431	1.128	.818	1.501

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.060	.074	.148	.000
Independence model	.077	.151	.204	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	166.861	171.815	242.123	269.123
Saturated model	90.000	98.257	215.437	260.437
Independence model	188.245	189.897	213.333	222.333

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1.402	1.151	1.716	1.444
Saturated model	.756	.756	.756	.826
Independence model	1.582	1.272	1.955	1.596

HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	31	37
Independence model	36	41

Execution time summary

Minimization:	.016
Miscellaneous:	.046
Bootstrap:	.000
Total:	.062

Data Rasio Kemandirian Daerah Jawa Tengah Periode 2006-2009

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2006			2007		
		PAD	Total Pendapatan	Rasio	PAD	Total Pendapatan	Rasio
1	Cilacap	78895457	932736973	0,084584893	82143538	1024420644	0,08018536
2	Banyumas	84391270	803084840	0,105083879	96386445	869387057	0,110867127
3	Purbalingga	47694606	514030873	0,092785489	52727439	649835164	0,081139713
4	Banjarnegara	43900256	552724135	0,079425256	44876890	629939465	0,071240004
5	Kebumen	92533197	713786454	0,129637088	54260879	752456584	0,072111641
6	Purworejo	32813869	542342430	0,060503968	48237524	639845971	0,075389275
7	Wonosobo	30618482	490201304	0,062461037	36582594	543670594	0,06728816
8	Magelang	62226400	663396086	0,09379977	70074706	764419583	0,091670475
9	Boyolali	59307283	630290112	0,094095214	67437537	707982597	0,0952531
10	Klaten	33920000	760141005	0,0446233	42545342	873757514	0,04869239
11	Sukoharjo	44008081	549271166	0,080120865	42449899	615425915	0,068976457
12	Wonogiri	47864470	656393840	0,072920352	50329495	726402345	0,069285975
13	Karanganyar	46052120	547727748	0,084078486	56923919	641317357	0,088760921
14	Sragen	52019760	617931700	0,084183673	65257963	740548294	0,088121144
15	Grobogan	41921570	639047881	0,065600045	53458621	750505574	0,071230145
16	Blora	36637785	539469610	0,067914456	43392412	643903003	0,067389672
17	Rembang	39998290	486007390	0,082299757	42255838	510249537	0,082814064
18	Pati	66128698	681368711	0,097052737	69152362	776279048	0,089081835
19	Kudus	51311620	529935402	0,096826179	55181579	667161278	0,082711004
20	Jepara	54110690	562502547	0,096196347	64442492	689753922	0,093428236
21	Demak	33811888	525152488	0,064384895	34892079	618252062	0,056436656
22	Semarang	66625755	571988038	0,116481029	70860484	656531018	0,107931662
23	Temanggung	31643817	456129603	0,069374618	34884581	541496071	0,064422593
24	Kendal	63330009	576116856	0,109925631	75771963	649162499	0,116722644
25	Batang	31030140	441187114	0,070333287	30968198	503000814	0,061566894
26	Pekalongan	30803316	475316079	0,064805963	42341231	556884427	0,076032349
27	Pemalang	59457261	638059213	0,093184551	55835580	686308758	0,081356357
28	Tegal	53852887	658887735	0,081733024	63363141	710722353	0,089153156
29	Brebes	47995353	763221215	0,062885245	64365360	831399491	0,077418089
30	Kota Magelang	36533677	290381924	0,125812504	35814774	325829622	0,109918717

Data Rasio Kemandirian Daerah

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2008			2009		
		PAD	Total Pendapatan	Rasio	PAD	Total Pendapatan	Rasio
1	Cilacap	102780342	1163540429	0,088334139	120745646	1200047963	0,10061735
2	Banyumas	107425765	968913212	0,110872433	120520362	1063750926	0,113297539
3	Purbalingga	63795293	683442606	0,093344039	83177001	733944394	0,11332875
4	Banjarnegara	46528340	689092471	0,067521185	60636815	737321723	0,08223929
5	Kebumen	58599425	856576267	0,068411217	63016364	880518532	0,071567334
6	Purworejo	51174861	709357095	0,072142594	60814317	751262476	0,080949494
7	Wonosobo	38158244	607458042	0,062816263	46324944	672541035	0,068880472
8	Magelang	81203386	838835083	0,096804947	75582196	873959400	0,086482503
9	Boyolali	63733408	782528345	0,081445494	73985148	840149865	0,088061846
10	Klaten	49549622	976911471	0,050720688	53142865	986484856	0,053870938
11	Sukoharjo	41898319	687729032	0,060922714	48842529	732951736	0,066638124
12	Wonogiri	54129295	841402410	0,064332232	49946258	879008191	0,056821152
13	Karanganyar	64470676	771365016	0,083579984	66971683	770365627	0,086934931
14	Sragen	65561026	804134190	0,081529957	72681309	797639563	0,091120491
15	Grobogan	59922461	812851245	0,073718852	77079602	843180476	0,091415307
16	Blora	50203193	711701567	0,070539669	49696651	722238086	0,068809236
17	Rembang	51150558	579272807	0,088301328	56887895	608044827	0,093558719
18	Pati	80677768	886445867	0,091012628	90667623	929443297	0,097550462
19	Kudus	71520068	774638583	0,092327015	83045781	906929402	0,091568077
20	Jepara	70427234	754683277	0,093320253	71948111	798595766	0,090093279
21	Demak	43817065	694563832	0,063085728	49822371	739930884	0,067333817
22	Semarang	82942881	748129661	0,110866986	90389871	781019130	0,115733236
23	Temanggung	37773970	576464288	0,065526991	47363939	623159390	0,076006139
24	Kendal	71684588	717457925	0,099914693	76805714	790488557	0,097162335
25	Batang	41192714	579900101	0,071034156	44643602	616827818	0,072376116
26	Pekalongan	50136941	673072590	0,074489649	58468320	673743831	0,086781232
27	Pemalang	66737480	756910319	0,088170921	81819334	829074219	0,098687587
28	Tegal	59370632	804180781	0,073827469	70551139	860862334	0,081954032
29	Brebes	71896767	924633898	0,07775701	80275021	966663521	0,083043395
30	Kota Magelang	40549584	360937195	0,112345263	47704619	380464679	0,125385145

Data Rasio Efektifitas Jawa Tengah Periode 2006-2009

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	Tahun 2006			tahun 2007		
		Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio
1	Cilacap	78895457	54801800	1,439651	82143538	63269550	1,298311
2	Banyumas	84391270	58338908	1,446569	96386445	58338908	1,652181
3	Purbalingga	47694606	42521949	1,121647	52727439	42521949	1,240005
4	Banjarnegara	43900256	30575319	1,435807	44876890	36524489	1,228679
5	Kebumen	92533197	35410075	2,613188	54260879	50751508	1,069148
6	Purworejo	32813869	29571573	1,109642	48237524	39899183	1,208985
7	Wonosobo	30618482	24445686	1,252511	36582594	25533351	1,432738
8	Magelang	62226400	51308578	1,212787	70074706	60387586	1,160416
9	Boyolali	59307283	42327225	1,401162	67437537	43201052	1,561016
10	Klaten	33920000	36271788	0,935162	42545342	40775724	1,043399
11	Sukoharjo	44008081	29411262	1,4963	42449899	37533328	1,130992
12	Wonogiri	47864470	33651957	1,422338	50329495	42735400	1,1777
13	Karanganyar	46052120	36634671	1,257064	56923919	48716331	1,168477
14	Sragen	52019760	36066250	1,442339	65257963	50590633	1,289922
15	Grobogan	41921570	34798508	1,204694	53458621	43687689	1,223654
16	Blora	36637785	30678412	1,194253	43392412	30732453	1,411941
17	Rembang	39998290	31426067	1,272774	42255838	51049660	0,82774
18	Pati	66128698	56824933	1,163727	69152362	55575776	1,24429
19	Kudus	51311620	47658156	1,07666	55181579	52726631	1,04656
20	Jepara	54110690	52435097	1,031956	64442492	53900233	1,195588
21	Demak	33811888	22986858	1,470923	34892079	29902617	1,166857
22	Semarang	66625755	53158287	1,253347	70860484	63803782	1,1106
23	Temanggung	31643817	35898655	0,881476	34884581	34986707	0,997081
24	Kendal	63330009	57193768	1,107289	75771963	52393853	1,446199
25	Batang	31030140	19331910	1,605125	30968198	25613625	1,209052
26	Pekalongan	30803316	24637313	1,250271	42341231	37117857	1,140724
27	Pemalang	59457261	38007908	1,564339	55835580	45047420	1,239485
28	Tegal	53852887	47079397	1,143874	63363141	58073801	1,09108
29	Brebes	47995353	33374166	1,438099	64365360	34121314	1,886368
30	Kota Magelang	36533677	25740227	1,419322	35814774	28720025	1,247031

Data Rasio Efektifitas Jawa Tengah

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	Tahun 2008			Tahun 2009		
		Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio
1	Cilacap	102780342	46307567	2,219515	120745646	100784000	1,198064
2	Banyumas	107425765	89087000	1,205852	120520362	101413858	1,188401
3	Purbalingga	63795293	56223000	1,134683	83177001	68865789	1,207813
4	Banjarnegara	46528340	41848553	1,111827	60636815	49599390	1,222531
5	Kebumen	58599425	53939781	1,086386	63016364	61130149	1,030856
6	Purworejo	51174861	39590008	1,292621	60814317	47480960	1,280815
7	Wonosobo	38158244	31512540	1,210891	46324944	45003352	1,029367
8	Magelang	81203386	71276162	1,139278	75582196	69554510	1,086661
9	Boyolali	63733408	53786692	1,184929	73985148	62787013	1,178351
10	Klaten	49549622	51334435	0,965232	53142865	66073040	0,804305
11	Sukoharjo	41898319	43081309	0,972541	48842529	45132000	1,082215
12	Wonogiri	54129295	41529000	1,30341	49946258	60942584	0,819563
13	Karanganyar	64470676	54224000	1,188969	66971683	64017107	1,046153
14	Sragen	65561026	54013000	1,213801	72681309	57450017	1,265122
15	Grobogan	59922461	44647488	1,342124	77079602	46890617	1,643817
16	Blora	50203193	45377000	1,106358	49696651	50000000	0,993933
17	Rembang	51150558	47342347	1,08044	56887895	56754633	1,002348
18	Pati	80677768	67505000	1,195138	90667623	70623592	1,283815
19	Kudus	71520068	56440909	1,267167	83045781	71404840	1,163027
20	Jepara	70427234	55951063	1,258729	71948111	72717676	0,989417
21	Demak	43817065	31872838	1,374746	49822371	41865674	1,190053
22	Semarang	82942881	69487294	1,193641	90389871	90188374	1,002234
23	Temanggung	37773970	36697140	1,029344	47363939	39993148	1,184301
24	Kendal	71684588	58434746	1,226746	76805714	62627065	1,226398
25	Batang	41192714	29990000	1,373548	44643602	36517563	1,222524
26	Pekalongan	50136941	42534804	1,178727	58468320	48132168	1,214745
27	Pemalang	66737480	52578612	1,269289	81819334	53658695	1,52481
28	Tegal	59370632	52720333	1,126143	70551139	67132953	1,050917
29	Brebes	71896767	45819000	1,569147	80275021	65081383	1,233456
30	Kota Magelang	40549584	33989756	1,192994	47704619	49373992	0,966189

Rasio Pertumbuhan APBD Jawa Tengah 2006-2009

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	Tahun 2006			Tahun 2007		
		Total Belanja Tahun T(2006)	Total belanja Tahun t-1(2005)	Rasio	Total Belanja Tahun T(2007)	Total belanja Tahun t-1(2006)	Rasio
1	Cilacap	825875111	552924730	49,36483507	1067071256	825875111	29,20491752
2	Banyumas	719985000	532868531	35,11494076	870904666	719985000	20,96150142
3	Purbalingga	478544000	354338890	35,05263281	556752030	478544000	16,34291309
4	Banjarnegara	506677930	379516631	33,50612032	610364335	506677930	20,46396712
5	Kebumen	618431278	414256928	49,28688845	895755398	618431278	44,84315879
6	Purworejo	463907479	354170858	30,98409102	580722935	463907479	25,18076584
7	Wonosobo	433928261	334135734	29,86586493	537828456	433928261	23,94409499
8	Magelang	622439030	440995769	41,14399134	806130719	622439030	29,51159554
9	Boyolali	530077206	427428312	24,01546438	738497658	530077206	39,31888594
10	Klaten	729406355	543766379	34,13965688	867096405	729406355	18,8770017
11	Sukoharjo	486775929	329236580	47,84989232	633407937	486775929	30,12310167
12	Wonogiri	604211110	440860220	37,05276244	635198533	604211110	5,128575507
13	Karanganyar	493244814	388737613	26,8837379	619989535	493244814	25,69610818
14	Sragen	593406430	403874750	46,92833112	701934395	593406430	18,28897692
15	Grobogan	582165712	451992263	28,7999286	739694326	582165712	27,05906768
16	Blora	448504872	370991823	20,89346562	568153118	448504872	26,67713407
17	Rembang	411063290	278421580	47,64059955	539616246	411063290	31,2732757
18	Pati	575823630	453304272	27,02806163	747399719	575823630	29,79663912
19	Kudus	476286478	427957954	11,2928206	603786452	476286478	26,76959769
20	Jepara	539720214	401140564	34,54640653	671017548	539720214	24,32692543
21	Demak	491235757	360640551	36,21201377	627766263	491235757	27,79327524
22	Semarang	531147398	373595743	42,17169439	652250825	531147398	22,8003427
23	Temanggung	423686683	269011106	57,49784063	503744676	423686683	18,8955651
24	Kendal	552963071	367293213	50,55085458	597618000	552963071	8,075571651
25	Batang	404498739	309373481	30,74770911	502074689	404498739	24,12268336
26	Pekalongan	446989524	337490914	32,44490606	604217604	446989524	35,17489148
27	Pemalang	583144513	390986697	49,14689361	651124067	583144513	11,65741124
28	Tegal	605018460	436224114	38,69440973	703315829	605018460	16,24700327
29	Brebes	633700300	466160813	35,9402769	847543970	633700300	33,7452373
30	Kota Magelang	242474775	172103665	40,88879223	317029441	242474775	30,74739053

Rasio Pertumbuhan APBD

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	Tahun 2008			Tahun 2009		
		Total Belanja Tahun T(2008)	Total belanja Tahun t-1(2007)	Rasio	Total Belanja Tahun T(2009)		Rasio
1	Cilacap	1172492785	1067071256	9,879521017	1.167.974.674,00	1.172.492.785,00	-0,385342329
2	Banyumas	973932843	870904666	11,8300178	1.070.009.266,00	973.932.843,00	9,864789312
3	Purbalingga	707774473	556752030	27,12562054	745.014.151,00	707.774.473,00	5,261517534
4	Banjarnegara	716227899	610364335	17,34432337	735.338.765,00	716.227.899,00	2,668266068
5	Kebumen	859246349	895755398	-4,075783309	946.181.526,00	859.246.349,00	10,11760796
6	Purworejo	692991235	580722935	19,33250665	758.043.855,00	692.991.235,00	9,387221182
7	Wonosobo	628220567	537828456	16,80686657	629.359.809,00	628.220.567,00	0,18134427
8	Magelang	853643213	806130719	5,893894486	850.314.467,00	853.643.213,00	-0,389945817
9	Boyolali	793262108	738497658	7,415656557	810.987.628,00	793.262.108,00	2,234509858
10	Klaten	1000134799	867096405	15,34297608	981.121.677,00	1.000.134.799,00	-1,90105594
11	Sukoharjo	717129974	633407937	13,21771202	710.827.126,00	717.129.974,00	-0,878898976
12	Wonogiri	846335488	635198533	33,23952182	903.594.058,00	846.335.488,00	6,765469582
13	Karanganyar	772834364	619989535	24,65280789	786.268.341,00	772.843.364,00	1,738273765
14	Sragen	805789213	701934395	14,79551632	807.787.741,00	805.789.213,00	0,248021191
15	Grobogan	871274392	739694326	17,78843792	813.339.697,00	871.274392,00	-6,649420152
16	Blora	769142355	568153118	35,37589263	804.635.000,00	769.142.355,00	4,614574242
17	Rembang	592524623	539616246	9,804815439	590.394.807,00	592.524.623,00	-0,359447678
18	Pati	900119172	747399719	20,43343731	957.336.803,00	900.119.172,00	6,356672847
19	Kudus	726323425	603786452	20,29475365	869.172.775,00	726.323.425,00	19,66745737
20	Jepara	744074361	671017548	10,88746684	753.184.661,00	744.074.361,00	1,224380314
21	Demak	691464003	627766263	10,14672877	748.921.779,00	691.463.003,00	8,309583109
22	Semarang	794396381	652250825	21,79308183	789.795.000,00	794.396.381,00	-0,579229854
23	Temanggung	611340692	503744676	21,35923636	606.950.607,00	611.340.692,00	-0,718107768
24	Kendal	756328308	597618000	26,55714989	786.579.283,00	756.328.308,00	3,999714764
25	Batang	578573194	502074689	15,23647909	581.860.419,00	578.573.194,00	0,568160612
26	Pekalongan	672945318	604217604	11,37466263	689.683.536,00	672.945.318,00	2,487307297
27	Pemalang	767167956	651124067	17,82208566	843.963.217,00	767.167.956,00	10,01022793
28	Tegal	872732362	703315829	24,08825822	847.808.763,00	872.732.362,00	-2,855812399
29	Brebes	973243124	847543970	14,83098912	926.528.772,00	973.243.124,00	-4,799864581
30	Kota Magelang	386124525	317029441	21,79453233	412.723.983,00	386.124.525,00	6,888828934

Data Rasio Ketergantungan Jawa Tengah Periode 2006-2009

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2006			2007		
		DAU	Total Pendapatan	Rasio	DAU	Total Pendapatan	Rasio
1	Cilacap	661263000	932736973	0,70894906	743064000	1024420644	0,72535
2	Banyumas	603887000	803084840	0,751959158	654154000	869387057	0,752431
3	Purbalingga	383925000	514030873	0,746890936	488217134	649835164	0,751294
4	Banjarnegara	422509000	552724135	0,76441207	452544000	629939465	0,718393
5	Kebumen	538688000	713786454	0,754690702	585365000	752456584	0,777939
6	Purworejo	432013000	542342430	0,796568692	471735000	639845971	0,737263
7	Wonosobo	359723000	490201304	0,733827097	389671000	543670594	0,716741
8	Magelang	502945000	663396086	0,758136821	548521000	764419583	0,717565
9	Boyolali	492181000	630290112	0,780880091	528505000	707982597	0,746494
10	Klaten	635488000	760141005	0,836013313	694207000	873757514	0,794508
11	Sukoharjo	421438000	549271166	0,767267656	460662000	615425915	0,748526
12	Wonogiri	523439000	656393840	0,797446545	556874000	726402345	0,766619
13	Karanganyar	421432000	547727748	0,769418751	459156000	641317357	0,715958
14	Sragen	466851000	617931700	0,755505827	513575000	740548294	0,693506
15	Grobogan	512838000	639047881	0,802503248	563744747	750505574	0,751153
16	Blora	410074000	539469610	0,760142911	447775000	643903003	0,695408
17	Rembang	342777000	486007390	0,705291745	361876000	510249537	0,709214
18	Pati	509573000	681368711	0,747866745	559748000	776279048	0,721065
19	Kudus	359184000	529935402	0,677788271	421953000	667161278	0,63246
20	Jepara	403190000	562502547	0,716778977	461230000	689753922	0,668688
21	Demak	408453000	525152488	0,777779806	438288000	618252062	0,708915
22	Semarang	412468000	571988038	0,721112982	455990000	656531018	0,694544
23	Temanggung	357822000	456129603	0,784474407	389124000	541496071	0,718609
24	Kendal	409296000	576116856	0,710439203	453755000	649162499	0,698985
25	Batang	333434000	441187114	0,7557655	362659000	503000814	0,720991
26	Pekalongan	377379000	475316079	0,793953785	411159000	556884427	0,73832
27	Pemalang	491281990	638059213	0,769963007	530443000	686308758	0,772893
28	Tegal	286000000	658887735	0,434064841	550497000	710722353	0,77456
29	Brebes	609597000	763221215	0,798716005	657982000	831399491	0,791415
30	Kota Magelang	216962000	290381924	0,747160832	235917000	325829622	0,72405

Data Rasio Ketergantungan

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2008			2009		
		DAU	Total Pendapatan	Rasio	DAU	Total Pendapatan	Rasio
1	Cilacap	773078652	1163540429	0,664419244	782143772	1200047963	0,65176
2	Banyumas	702152351	968913212	0,724680335	735150422	1063750926	0,691093
3	Purbalingga	458204824	683442606	0,670436435	462101482	733944394	0,629614
4	Banjarnegara	488707563	689092471	0,709204618	504757075	737321723	0,684582
5	Kebumen	616395049	856576267	0,719603231	638804310	880518532	0,725487
6	Purworejo	515796414	709357095	0,727132241	526622715	751262476	0,700984
7	Wonosobo	427667185	607458042	0,70402753	431735727	672541035	0,641947
8	Magelang	588001786	838835083	0,700974241	596437825	873959400	0,682455
9	Boyolali	582512206	782528345	0,74439758	586021039	840149865	0,69752
10	Klaten	744676781	976911471	0,762276627	726192262	986484856	0,736141
11	Sukoharjo	498935688	687729032	0,725482952	524980151	732951736	0,716255
12	Wonogiri	598932854	841402410	0,711826882	614599465	879008191	0,699197
13	Karanganyar	506156445	771365016	0,656182786	517670406	770365627	0,67198
14	Sragen	551265965	804134190	0,685539767	551913436	797639563	0,691933
15	Grobogan	615030004	812851245	0,756632911	614891166	843180476	0,729252
16	Blora	478260120	711701567	0,671995317	487316394	722238086	0,674731
17	Rembang	398410703	579272807	0,687777327	407158671	608044827	0,669619
18	Pati	398410703	886445867	0,449447302	621169150	929443297	0,668324
19	Kudus	460540680	774638583	0,594523291	471869492	906929402	0,520294
20	Jepara	505641495	754683277	0,670004902	522061147	798595766	0,653724
21	Demak	483239311	694563832	0,695744997	488814489	739930884	0,660622
22	Semarang	491166076	748129661	0,656525335	508704917	781019130	0,651335
23	Temanggung	421056329	576464288	0,730411819	430269307	623159390	0,690464
24	Kendal	490895234	717457925	0,684214665	512809060	790488557	0,648724
25	Batang	401574876	579900101	0,69248975	416406338	616827818	0,675077
26	Pekalongan	465324091	673072590	0,6913431	475248442	673743831	0,705384
27	Pemalang	577864687	756910319	0,763451987	609478066	829074219	0,735131
28	Tegal	606452130	804180781	0,754124128	624981282	860862334	0,725994
29	Brebes	716426000	924633898	0,774821258	716589942	966663521	0,741302
30	Kota Magelang	256525338	360937195	0,710720152	256728827	380464679	0,674777

Surplus Defisit Jawa Tengah Periode 2006-2009

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2006			2007		
		Pendapatan	Pengeluaran	Surplus/Defisit	Pendapatan	Pengeluaran	Surplus/Defisit
1	Cilacap	932736973	825875111	106861862	1024420644	1067071256	-42650612
2	Banyumas	803084840	719985000	83099840	869387057	870904666	-1517609
3	Purbalingga	514030873	478544000	35486873	649835164	556752030	93083134
4	Banjarnegara	552724135	506677930	46046205	629939465	610364335	19575130
5	Kebumen	713786454	618431278	95355176	752456584	895755398	-143298814
6	Purworejo	542342430	463907479	78434951	639845971	580722935	59123036
7	Wonosobo	490201304	433928261	56273043	543670594	537828456	5842138
8	Magelang	663396086	622439030	40957056	764419583	806130719	-41711136
9	Boyolali	630290112	530077206	100212906	707982597	738497658	-30515061
10	Klaten	760141005	729406355	30734650	873757514	867096405	6661109
11	Sukoharjo	549271166	486775929	62495237	615425915	633407937	-17982022
12	Wonogiri	656393840	604211110	52182730	726402345	635198533	91203812
13	Karanganyar	547727748	493244814	54482934	641317357	619989535	21327822
14	Sragen	617931700	593406430	24525270	740548294	701934395	38613899
15	Grobogan	639047881	582165712	56882169	750505574	739694326	10811248
16	Blora	539469610	448504872	90964738	643903003	568153118	75749885
17	Rembang	486007390	411063290	74944100	510249537	539616246	-29366709
18	Pati	681368711	575823630	105545081	776279048	747399719	28879329
19	Kudus	529935402	476286478	53648924	667161278	603786452	63374826
20	Jepara	562502547	539720214	22782333	689753922	671017548	18736374
21	Demak	525152488	491235757	33916731	618252062	627766263	-9514201
22	Semarang	571988038	531147398	40840640	656531018	652250825	4280193
23	Temanggung	456129603	423686683	32442920	541496071	503744676	37751395
24	Kendal	576116856	552963071	23153785	649162499	597618000	51544499
25	Batang	441187114	404498739	36688375	503000814	502074689	926125
26	Pekalongan	475316079	446989524	28326555	556884427	604217604	-47333177
27	Pemalang	638059213	583144513	54914700	686308758	651124067	35184691
28	Tegal	658887735	605018460	53869275	710722353	703315829	7406524
29	Brebes	763221215	633700300	129520915	831399491	847543970	-16144479
30	Kota Magelang	290381924	242474775	47907149	325829622	317029441	8800181

Surplus Defisit

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2008			2009		
		Pendapatan	Pengeluaran	Surplus/Defisit	Pendapatan	Pengeluaran	Surplus/Defisit
1	Cilacap	1163540429	1172492785	-8952356	1200047963	1167974674	32073289
2	Banyumas	968913212	973932843	-5019631	1063750926	1070009266	-6258340
3	Purbalingga	683442606	707774473	-24331867	733944394	745014151	-11069757
4	Banjarnegara	689092471	716227899	-27135428	737321723	735338765	1982958
5	Kebumen	856576267	859246349	-2670082	880518532	946181526	-65662994
6	Purworejo	709357095	692991235	16365860	751262476	758043855	-6781379
7	Wonosobo	607458042	628220567	-20762525	672541035	629359809	43181226
8	Magelang	838835083	853643213	-14808130	873959400	850314467	23644933
9	Boyolali	782528345	793262108	-10733763	840149865	810987628	29162237
10	Klaten	976911471	1000134799	-23223328	986484856	981121677	5363179
11	Sukoharjo	687729032	717129974	-29400942	732951736	710827126	22124610
12	Wonogiri	841402410	846335488	-4933078	879008191	903594058	-24585867
13	Karanganyar	771365016	772834364	-1469348	770365627	786268341	-15902714
14	Sragen	804134190	805789213	-1655023	797639563	807787741	-10148178
15	Grobogan	812851245	871274392	-58423147	843180476	813339697	29840779
16	Blora	711701567	769142355	-57440788	722238086	804635000	-82396914
17	Rembang	579272807	592524623	-13251816	608044827	590394807	17650020
18	Pati	886445867	900119172	-13673305	929443297	957336803	-27893506
19	Kudus	774638583	726323425	48315158	906929402	869172775	37756627
20	Jepara	754683277	744074361	10608916	798595766	753184661	45411105
21	Demak	694563832	691464003	3099829	739930884	748921779	-8990895
22	Semarang	748129661	794396381	-46266720	781019130	789795000	-8775870
23	Temanggung	576464288	611340692	-34876404	623159390	606950607	16208783
24	Kendal	717457925	756328308	-38870383	790488557	786579283	3909274
25	Batang	579900101	578573194	1326907	616827818	581860419	34967399
26	Pekalongan	673072590	672945318	127272	673743831	689683536	-15939705
27	Pemalang	756910319	767167956	-10257637	829074219	843963217	-14888998
28	Tegal	804180781	872732362	-68551581	860862334	847808763	13053571
29	Brebes	924633898	973243124	-48609226	966663521	926528772	40134749
30	Kota Magelang	360937195	386124525	-25187330	380464679	412723983	-32259304

Data Pengganguran Jawa Tengah Periode 2006-2009

No	Provinsi/ Kabupaten / Kota	2006	2007	2008	2009
1	Cilacap	71338	93016	69485	89175
2	Banyumas	57800	58273	55124	59582
3	Purbalingga	17187	32008	14168	19638
4	Banjarnegara	29613	30563	29784	22993
5	Kebumen	53030	45193	57136	49241
6	Purworejo	14973	21257	16741	17748
7	Wonosobo	11838	23258	10645	14292
8	Magelang	38914	42462	34105	31253
9	Boyolali	22744	41517	19402	29899
10	Klaten	49365	52113	45124	39271
11	Sukoharjo	35867	44532	34138	37359
12	Wonogiri	27722	29563	25102	29159
13	Karanganyar	24695	30840	23947	37608
14	Sragen	19644	31318	19845	28624
15	Grobogan	37267	45080	34165	46610
16	Blora	18081	19185	15024	34361
17	Rembang	21593	17844	20314	18058
18	Pati	52744	55607	51024	49094
19	Kudus	22517	31246	21013	32306
20	Jepara	16189	33031	15024	24562
21	Demak	34954	40154	30874	30022
22	Semarang	28071	48661	26148	40267
23	Temanggung	17352	28732	15241	16514
24	Kendal	40787	30327	34647	29255
25	Batang	31536	30843	32015	24733
26	Pekalongan	31830	35802	31647	17993
27	Pemalang	74502	55792	65471	79377
28	Tegal	60806	69196	63541	60152
29	Brebes	101083	81094	98145	79116
30	Kota Magelang	5766	7855	6015	9863

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
SUMBER: data dan informasi 2007 dan 2009

No	**Kabupaten/Kota**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1	Kab. Cilacap	20,90	22,25	24,93	22,59	21,40	19,88
2	Kab. Banyumas	21,47	22,02	24,44	22,46	22,93	21,52
3	Kab. Purbalingga	31,20	29,95	32,38	30,24	27,12	24,97
4	Kab. Banjarnegara	26,91	27,35	29,40	27,18	23,34	21,36
5	Kab. Kebumen	30,95	29,83	32,49	30,25	27,87	25,73
6	Kab. Purworejo	23,51	22,77	22,75	20,49	18,22	17,02
7	Kab. Wonosobo	33,15	31,68	34,43	32,29	27,72	25,91
8	Kab. Magelang	16,10	15,42	17,36	17,37	16,49	15,19
9	Kab. Boyolali	18,47	17,75	20,00	18,06	17,08	15,96
10	Kab. Klaten	23,38	22,48	22,99	22,27	21,72	19,68
11	Kab. Sukoharjo	14,38	13,67	15,63	14,02	12,13	11,51
12	Kab. Wonogiri	24,43	25,21	27,01	24,44	20,71	19,08
13	Kab. Karanganyar	16,14	16,14	18,69	17,39	15,68	14,73
14	Kab. Sragen	26,06	24,28	23,72	21,24	20,83	19,70
15	Kab. Grobogan	29,30	28,00	27,60	25,14	19,84	18,68
16	Kab. Blora	22,97	21,73	23,95	21,46	18,79	17,70
17	Kab. Rembang	32,00	30,72	33,20	30,71	27,21	25,86
18	Kab. Pati	20,67	19,82	22,14	19,79	17,90	15,92
19	Kab. Kudus	11,44	10,93	12,05	10,73	12,58	10,80
20	Kab. Jepara	9,88	10,39	11,75	10,44	11,05	9,60
21	Kab. Demak	24,94	23,60	26,03	23,50	21,24	19,70
22	Kab. Semarang	13,68	13,16	13,62	12,34	11,37	10,66
23	Kab. Temanggung	15,22	14,50	16,62	16,55	16,39	15,05
24	Kab. Kendal	20,87	20,06	21,59	20,70	17,87	16,02
25	Kab. Batang	19,01	18,15	19,99	20,79	18,08	16,61
26	Kab. Pekalongan	21,50	20,47	22,80	20,31	19,52	17,93
27	Kab. Pemalang	22,31	22,59	25,30	22,79	23,92	22,17
28	Kab. Tegal	20,53	19,60	20,71	18,50	15,78	13,98
29	Kab. Brebes	29,10	27,79	30,36	27,93	25,98	24,39
30	Kota Magelang	14,01	12,94	11,19	10,01	11,16	10,11

Data Indeks Pembangunan Manusia dalam bentuk %

No	Profinsi/ Kabupaten / Kota	2006	2007	2008	2009
1	Cilacap	69,8	70,25	70,91	71,39
2	Banyumas	70,8	71,23	71,77	72,27
3	Purbalingga	69,9	70,38	70,89	71,51
4	Banjarnegara	68,3	68,54	68,99	69,63
5	Kebumen	69,5	69,96	70,19	70,73
6	Purworejo	70,2	70,68	71,29	71,88
7	Wonosobo	68,8	69,22	69,55	70,08
8	Magelang	70,6	71,03	71,43	71,76
9	Boyolali	69,4	69,63	69,99	70,44
10	Klaten	71,8	72,48	72,93	73,41
11	Sukoharjo	71,7	72,46	73,01	73,29
12	Wonogiri	69,9	70,11	70,47	71,04
13	Karanganyar	71,1	71,59	72,21	72,55
14	Sragen	67,8	68,98	69,57	70,27
15	Grobogan	69,2	69,75	70,22	70,6
16	Blora	68,4	69,11	69,63	70,14
17	Rembang	69,7	70,54	71,12	71,55
18	Pati	71,8	71,87	72,26	72,72
19	Kudus	71,3	71,66	72,02	72,57
20	Jepara	70	71,45	71,94	72,45
21	Demak	70,3	71,05	71,56	72,1
22	Semarang	72,2	72,93	73,34	73,66
23	Temanggung	72,7	73,08	73,43	73,85
24	Kendal	68,3	68,91	69,4	70,07
25	Batang	68,4	68,64	69,23	69,84
26	Pekalongan	69,4	69,69	70,31	70,83
27	Pemalang	67,4	67,89	68,38	69,02
28	Tegal	67,8	68,83	69,54	70,08
29	Brebes	65,9	66,57	67,08	67,69
30	Kota Magelang	75,5	75,69	76,09	76,37

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2004-2008, Tanpa Migas (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	10623929,25	11140846,35	11689092,90	12303308,34
2	Kab. Banyumas	3759547,61	3958645,95	4171468,95	4400542,23
3	Kab. Purbalingga	2018808,10	2143746,23	2257392,77	2384014,04
4	Kab. Banjarnegara	2376694,59	2495785,82	2619992,61	2753939,73
5	Kab. Kebumen	2460816,97	2571062,88	2721254,09	2828395,07
6	Kab. Purworejo	2442927,30	2591535,38	2737087,13	2872723,79
7	Kab. Wonosobo	1621132,33	1679149,65	1741148,31	1811092,68
8	Kab. Magelang	3405369,22	3582647,65	3761388,59	3938764,68
9	Kab. Boyolali	3600897,97	3748102,11	3889372,86	4100520,26
10	Kab. Klaten	4253788,00	4394688,02	4567200,96	4761018,67
11	Kab. Sukoharjo	4120437,35	4330992,90	4540751,53	4756902,50
12	Kab. Wonogiri	2528851,78	2657068,89	2770435,78	2901577,44
13	Kab. Karanganyar	4401301,73	4654054,50	4900690,40	5076549,87
14	Kab. Sragen	2442570,43	2582492,48	2729450,32	2893427,19
15	Kab. Grobogan	2682467,18	2799700,55	2948793,80	3097093,25
16	Kab. Blora	1742962,60	1811864,01	1913763,35	2010908,67
17	Kab. Rembang	1926563,25	1999951,16	2093412,59	2186736,49
18	Kab. Pati	3770330,52	3966062,17	4162082,37	4357144,04
19	Kab. Kudus	10911733,76	11242693,32	11683819,73	12125681,79
20	Kab. Jepara	3554051,11	3722677,82	3889988,85	4085438,36
21	Kab. Demak	2570573,50	2677366,77	2787524,02	2901151,51
22	Kab. Semarang	4652041,80	4871444,25	5079003,74	5300723,41
23	Kab. Temanggung	2060140,23	2143221,22	2219155,63	2309841,53
24	Kab. Kendal	4433799,54	4625437,33	4822465,28	5020087,37
25	Kab. Batang	2022301,42	2092973,93	2169854,55	2250616,82
26	Kab. Pekalongan	2710378,32	2834685,01	2970214,98	3098072,64
27	Kab. Pemalang	2865095,20	2993296,76	3142808,70	3293056,25
28	Kab. Tegal	2955121,91	3120395,64	3286263,44	3466785,57
29	Kab. Brebes	4551196,99	4769145,46	4998528,19	5247897,41
30	Kota Magelang	899564,99	946063,73	993835,20	1044650,24

Pertumbuhan ekonomi dalam persen (%)

	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	4,72	4,87	4,92	5,25
2	Kab. Banyumas	4,48	5,30	5,38	5,49
3	Kab. Purbalingga	5,06	6,19	5,30	5,61
4	Kab. Banjarnegara	4,35	5,01	4,98	5,11
5	Kab. Kebumen	4,08	4,48	5,84	3,94
6	Kab. Purworejo	5,23	6,08	5,62	4,96
7	Kab. Wonosobo	3,23	3,58	3,69	4,02
8	Kab. Magelang	4,91	5,21	4,99	4,72
9	Kab. Boyolali	4,19	4,09	3,77	5,43
10	Kab. Klaten	2,30	3,31	3,93	4,24
11	Kab. Sukoharjo	4,53	5,11	4,84	4,76
12	Kab. Wonogiri	4,07	5,07	4,27	4,73
13	Kab. Karanganyar	5,08	5,74	5,30	3,59
14	Kab. Sragen	5,18	5,73	5,69	6,01
15	Kab. Grobogan	4,00	4,37	5,33	5,03
16	Kab. Blora	3,85	3,95	5,62	5,08
17	Kab. Rembang	5,53	3,81	4,67	4,46
18	Kab. Pati	4,45	5,19	4,94	4,69
19	Kab. Kudus	2,48	3,03	3,92	3,78
20	Kab. Jepara	4,19	4,74	4,49	5,02
21	Kab. Demak	4,02	4,15	4,11	4,08
22	Kab. Semarang	3,81	4,72	4,26	4,37
23	Kab. Temanggung	3,31	4,03	3,54	4,09
24	Kab. Kendal	3,66	4,32	4,26	4,10
25	Kab. Batang	2,51	3,49	3,67	3,72
26	Kab. Pekalongan	4,21	4,59	4,78	4,30
27	Kab. Pemalang	3,72	4,47	4,99	4,78
28	Kab. Tegal	5,19	5,59	5,32	5,49
29	Kab. Brebes	4,71	4,79	4,81	4,99
30	Kota Magelang	2,44	5,17	5,05	5,11